BADAN POM

# LAPORAN KINERJA INTERIM

## BPOM

TRIWULAN III

2026



# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut antara lain menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, dan *achievement* BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan III tahun 2026, terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Sangat Baik, namun terdapat juga IKU yang masih memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang Sangat Baik pada periode triwulan III tahun 2026 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2026 ini. Selain itu, capaian yang masih belum mencapai target agar dapat ditingkatkan kinerjanya untuk mengejar target yang ditetapkan. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mecapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertangungjawaban BPOM dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPOM di masa mendatang.

**Jakarta, 23 Oktober 2026**
**Kepala BPOM RI**

**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... iii

**RINGKASAN EKSEKUTIF** ..... iv

**HIGHLIGHT** ..... v

**PENDAHULUAN** ..... 1

**A. Gambaran Umum Organisasi** ..... 1

**B. Struktur Organisasi** ..... .2

**C. Mandat dan Peran Strategis** ..... 3

**D. Sistematika Pelaporan** ..... 5

**PERENCANAAN KINERJA** ..... 6

**A. Rencana Strategis 2025-2029** ..... 6

**B. Prioritas Nasional Tahun 2026** ..... 12

**C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026** ..... 14

**D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026** ..... 15

**E. Pagu Anggaran BPOM** ..... 17

**F. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** ..... 22

**AKUNTABILITAS KINERJA** ..... 24

**A. Capaian Indikator BPOM terhadap Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan....** ..... 24

**B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2026** ..... 28

**C. Analisis Capaian Kinerja** ..... 30

**D. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi** ..... 57

**E. Realisasi Anggaran** ..... 61

**PENUTUP** ..... 66

**Lampiran** ..... 67

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM tahun 2026, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis yaitu: 1) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 2) Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu; 3) Meningkatnya Efektifitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 4) Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; 5) Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif, dan Adaptif untuk Pelayanan yang Prima. Pencapaian kelima sasaran strategis tersebut diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan III Tahun 2026 terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS). Dari 5 (lima) IKSS yang diukur, 1 (satu) IKSS memperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik” ($100\% \leq x \leq 110\%$), 3 (tiga) IKSS memperoleh capaian dengan kategori “Baik” ($90\% < x \leq 100\%$), dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan ketegori “Tidak Dapat Disimpulkan” ($x > 110\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2026 memiliki pagu sebesar Rp1.949.368.991.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan III, telah direalisasikan sebesar Rp1.408.828.131.498,00 atau 72,27% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2026. Komitmen dan tanggung jawab secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.

# HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2026

## JULI

### BPOM Tegaskan Dukungan dan Sinergi Bersama Polri dalam Melindungi Masyarakat




Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus bersinergi dan bekerja sama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. BPOM turut hadir pada Peringatan Ke-80 Hari Bhayangkara pada Rabu (1/7/2026). Momentum Hari Bhayangkara tahun ini menjadi pengingat bahwa perlindungan masyarakat membutuhkan kolaborasi lintas sektor. BPOM meyakini sinergi yang telah terbangun bersama Polri akan terus diperkuat guna mendukung terciptanya ekosistem pengawasan obat dan makanan yang semakin efektif, responsif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan.

### Tingkatkan Mutu Pelayanan, Kepala BPOM Taruna Ikrar Bahas Strategi Inovatif Layanan Publik Bersama Kementerian PANRB



Kepala BPOM Taruna Ikrar beserta jajaran pimpinan tinggi madya dan pratama BPOM melakukan audiensi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Nanik Murwati, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Aba Subagja. aruna Ikrar kemudian memberikan paparan tentang dukungan BPOM terhadap kebijakan prioritas Presiden RI. Taruna menjelaskan bahwa BPOM berperan dalam tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, BPOM ikut mendukung rencana pengembangan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)/Apotek Desa, dan Program 3 Juta Rumah yang bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) terkait pengembangan sistem informasi pengadaan dan perbantuan

jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa (JF PPBJ). “Hingga Juni 2026, UPT BPOM telah bergabung untuk memberikan layanan di 141 MPP atau 45,04% dari total 313 MPP yang telah diresmikan oleh Kementerian PANRB. BPOM terus berinovasi untuk pemenuhan layanan MPP, salah satunya yaitu Inovasi SMART LAURA oleh Balai Besar POM di Palangka Raya yang memanfaatkan teknologi Doorbell dan CCTV sebagai alat komunikasi dua arah. Inovasi ini turut direplikasi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk MPP di Kabupaten Langsa dan saat ini masih berfungsi serta memudahkan layanan saat kondisi bencana banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu,” papar Taruna Ikrar.

Sebagai salah satu dari kementerian/lembaga yang telah menandatangani Memorandum of Understanding/MoU tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP, BPOM memohon dukungan Kementerian PANRB, terutama mengenai penguatan kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat. Koordinasi antara BPOM dengan DPMPTSP saat ini dirasa masih sulit dilakukan, salah satunya dikarenakan keterbatasan jumlah loket yang tersedia di MPP. Untuk itu, Taruna menyatakan akan terus mengupayakan langkah-langkah inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, yang nantinya langkah tersebut juga dapat direplikasi oleh seluruh UPT BPOM.

**BPOM Gaungkan Kolaborasi 5 Benua Untuk Tingkatkan Kapasitas Laboratorium Masa Depan**




BPOM terus berupaya meningkatkan kapasitas laboratorium sebagai fondasi utama pengawasan obat dan makanan yang berbasis sains, inovasi, dan kolaborasi global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Seminar Internasional bertajuk The Laboratory Future: Sustainability in Innovation and Operations, Perspective from 5 Continents yang diselenggarakan secara hybrid dari Auditorium Gedung Merah Putih Kantor BPOM dan daring melalui platform Zoom Meeting.

Seminar yang berlangsung selama 2 hari (6–7 Juli 2026) ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi internasional dan membahas masa depan laboratorium dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat. Seminar ini membahas berbagai perkembangan terkini di bidang laboratorium, antara lain penerapan high-performance thin-layer chromatography (HPTLC), transformasi digital melalui Laboratory Information Management System (LIMS), konsep green laboratory, metode mikrobiologi cepat, sistem otomasi dan robotik laboratorium, serta deteksi kontaminan baru seperti nanoplastik dalam pangan dan produk farmasi. Peserta kegiatan terdiri atas petugas

laboratorium internal dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) maupun unit pelaksana teknis (UPT) BPOM, kementerian/lembaga, peneliti, serta akademisi dari perguruan tinggi nasional.

**Sinergi Strategis BPOM dan CDSCO India Perkokoh Pengawasan Obat**



Presiden RI Prabowo Subianto baru saja menerima tamu kehormatan, yaitu Perdana Menteri India Narendra Modi yang hadir di Jakarta pada Selasa (7/7/2026). Presiden Prabowo menyebut bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam upaya mempererat kemitraan strategis di antara kedua negara. Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir langsung menyaksikan pengukuhan kesepakatan yang dilakukan di Istana Negara. Ia juga turut menghadiri kegiatan Indian Community Reception yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC). Agenda ini mempertegas kuatnya kemitraan strategis antara Indonesia dan India, yang dibalut dalam kehangatan budaya untuk mempererat hubungan kedua negara. Sebelumnya, BPOM telah memperbarui komitmen kerja sama dengan otoritas pengawas obat India atau Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) pada Selasa (30/6/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat sistem pengawasan produk medis sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara di sektor kesehatan.

Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kolaborasi sebelumnya yang telah berjalan pada periode 2018 hingga 2023. Prosesi penandatanganan dokumen penting ini dilakukan secara desk to desk oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Duta Besar Republik India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, yang bertindak mewakili pihak CDSCO dan Kementerian Kesehatan India. Tujuan utama dari penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ini adalah untuk memfasilitasi dialog konstruktif mengenai peraturan perundang-undangan produk medis. Adapun produk medis yang dicakup dalam perjanjian ini meliputi produk farmasi (termasuk bahan baku farmasi), produk biologi, serta produk kosmetik.

Dalam kemitraan strategis ini, kedua negara menyepakati 5 ruang lingkup utama yang menjadi fokus kolaborasi. Fokus pertama diarahkan pada peningkatan pemahaman regulasi guna menyelaraskan kerangka aturan masing-masing negara, termasuk farmakope nasional dan sistem regulatori. Selain itu, poin kedua menekankan pentingnya pertukaran informasi dan praktik terbaik terkait standar internasional, seperti cara berlaboratorium yang baik (good laboratory practices/GLP), cara uji klinik yang baik (good clinical practices/GCP), hingga cara pembuatan obat yang baik (good manufacturing practices/GMP). Sinergi ini juga berfokus pada penguatan sistem keamanan obat melalui pertukaran informasi keselamatan, farmakovigilans, serta

penanganan kejadian tidak diinginkan (adverse events). Ruang lingkup keempat dan kelima mencakup partisipasi aktif dalam forum ilmiah, seperti konferensi, simposium, dan seminar, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas koordinasi kedua lembaga di berbagai forum internasional. Kesepakatan bilateral ini dijadwalkan berlaku selama 5 tahun ke depan, serta dilengkapi dengan klausul perpanjangan otomatis untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya. Melalui sinergi ini, pengawasan obat dan makanan di Indonesia diharapkan dapat berjalan semakin kokoh, sekaligus menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa bahan baku farmasi, baik yang diimpor maupun diproduksi di dalam negeri, telah memenuhi standar keamanan tertinggi bagi masyarakat luas.

**BPOM Percepat Transformasi Regulasi, Dukung Pengembangan Vaksin Dengue mRNA Karya Anak Bangsa**




Indonesia kembali mencatatkan langkah penting dalam mewujudkan kemandirian kesehatan melalui peluncuran Prototipe Vaksin Dengue Tetravalen Berbasis mRNA yang dikembangkan menggunakan gen preM-E dari virus dengue strain Indonesia. Kepala BPOM Taruna Ikrar hadir dalam acara peluncuran yang dilakukan pada Rabu (8/7/2026) di Kantor Kementerian Kesehatan. Peluncuran prototipe vaksin ini menjadi tonggak penting dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi kesehatan nasional sekaligus implementasi kerja sama strategis Indonesia dan Tiongkok di bidang vaksin, genomik, dan bioteknologi kesehatan.

Prototipe ini merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Indonesia, Tsinghua University, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia, dengan dukungan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sains dan Teknologi Republik Rakyat Tiongkok, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta pendampingan regulatori dari BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pengembangan vaksin berbasis teknologi messenger RNA (mRNA) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menghasilkan inovasi kesehatan yang mampu menjawab tantangan penyakit menular sekaligus memperkuat kemandirian nasional di bidang farmasi dan bioteknologi.

**BPOM Temukan Lebih dari 2,1 Juta Kosmetik Tidak Memenuhi Ketentuan, Masyarakat Diimbau Lebih Cermat Memilih Produk**




BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta *pieces* kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dengan nilai keekonomian sekitar Rp35,8 miliar dalam intensifikasi pengawasan tahun 2026. Temuan tersebut menunjukkan masih tingginya peredaran kosmetik ilegal sehingga peran masyarakat menjadi semakin penting dalam memilih produk yang aman.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar pada Konferensi Pers Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Tahun 2026 yang digelar di Auditorium Gedung Merah Putih, Senin (13/7/2026). Konferensi pers ini memaparkan hasil pengawasan terhadap peredaran kosmetik, baik di sarana distribusi maupun media online. Media online menjadi fokus dalam intensifikasi pengawasan kali ini mengingat besarnya pendapatan penjualan produk kategori perawatan, kecantikan, dan skincare di e-commerce.

**BPOM Berkinerja Optimal di Tengah Keterbatasan Anggaran, Komisi IX DPR RI Beri Apresiasi**



BPOM kembali menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program yang optimal di tengah keterbatasan anggaran melalui Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran (TA) 2025. Kinerja tersebut dipaparkan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). RDP yang berjalan efektif ini dibuka oleh Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene ini dihadiri sejumlah anggota Komisi IX dan jajaran BPOM.

Dalam paparannya, Kepala BPOM menyampaikan, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan BPOM Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan capaian tersebut, BPOM berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut sejak Tahun Anggaran 2014 hingga 2025. Selain mempertahankan tata kelola keuangan yang akuntabel, BPOM juga mencatat realisasi belanja sebesar Rp1,76 triliun atau 99,51% dari pagu anggaran nonblokir. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp284,3 miliar atau 121% dari target yang ditetapkan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran yang dikelola BPOM diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberpihakan pada masyarakat ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan obat dan makanan sekaligus mendukung daya saing pelaku usaha nasional, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

**Sokong Koperasi Merah Putih, BPOM Kawal Ketat Keamanan Pangan dan Obat hingga ke Desa**




BPOM siap mengambil peran strategis dalam menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta, Senin (20/7/2026). Rakortas ini digelar sebagai tindak lanjut dari rapat terbatas mengenai program KDKMP, yang diproyeksikan menjadi infrastruktur utama pemerintah sekaligus *offtaker* atau pihak pembeli siaga yang menjamin penyerapan hasil produksi komoditas desa. Langkah besar ini berjalan selaras dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"KDKMP bukan sekadar koperasi, tetapi menjadi simpul layanan pemerintah di desa yang akan memangkas rantai distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, sekaligus menyerap hasil produksi petani dan pelaku usaha desa dengan harga yang lebih baik," tegas Menko Bidang Pangan. Dalam cetak biru program tersebut, KDKMP akan mengelola berbagai fasilitas vital bagi masyarakat desa, mulai dari klinik, apotek, fasilitas pergudangan pendingin (*cold storage*), hingga gerai penjualan kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satu fokus utama BPOM dalam mendukung KDKMP adalah memastikan seluruh produk pangan olahan yang beredar di desa memenuhi standar keamanan tertinggi. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, gerai KDKMP yang menjual pangan olahan diwajibkan menerapkan Pedoman Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB).

**Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Kepala BPOM Berkomitmen Dorong Optimalisasi Digitalisasi Pelayanan Publik**



Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyampaikan taklimat di hadapan para Menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pimpinan instansi pemerintah. Sidang kabinet tersebut menjadi forum untuk menyamakan persepsi terhadap arah pelaksanaan agenda prioritas nasional sekaligus evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi terhadap berbagai capaian pelayanan publik pemerintah. Salah satu yang mendapat perhatian adalah pelayanan publik BPOM. Melalui materi yang ditampilkan dalam sidang kabinet, Presiden menyoroti beragam layanan strategis BPOM yang mendukung pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha, mulai dari registrasi obat dan produk biologi, notifikasi kosmetik, registrasi pangan olahan, registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan, sertifikasi sarana produksi dan distribusi, persetujuan uji klinik, hingga pelayanan surat keterangan impor dan ekspor.

Sorotan tersebut mencerminkan peran strategis BPOM dalam mendukung kemudahan berusaha sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Pelayanan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap obat dan makanan yang beredar di Indonesia memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Capaian tersebut sejalan dengan transformasi pelayanan publik yang terus dilakukan BPOM melalui digitalisasi proses bisnis, penyederhanaan regulasi berbasis risiko, serta percepatan layanan perizinan. Berbagai inovasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian layanan kepada pelaku usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing industri obat dan makanan nasional.

**Aplikasi Cek BPOM Raih Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026**




BPOM torehkan prestasi di bidang transformasi digital. Aplikasi Cek BPOM berhasil meraih penghargaan pada kategori Top Public Service App-Public Agencies dalam ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 yang diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPOM Taruna Ikrar dan menjadi bentuk apresiasi publik atas komitmen BPOM dalam menghadirkan layanan digital yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. “Aplikasi Cek BPOM dinilai menjadi salah satu inovasi pelayanan publik yang mampu mendukung keterbukaan informasi sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat melalui akses cepat terhadap informasi keamanan, mutu, dan legalitas obat serta makanan,” terang Taruna Ikrar setelah menerima penghargaan.

Kepala BPOM menjelaskan bahwa data yang ditampilkan dalam aplikasi Cek BPOM berasal dari basis data produk yang telah memperoleh persetujuan sebelum beredar (pre-market). Informasi yang tersedia meliputi nama produk, nomor registrasi, kategori produk, bentuk sediaan, komposisi, nama perusahaan pendaftar, produsen, hingga tanggal penerbitan izin edar. “Saya mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan sebelum membeli atau menggunakan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, maupun pangan olahan,” ujar Taruna Ikrar. Verifikasi melalui BPOM Mobile menjadi salah satu langkah sederhana untuk memastikan produk yang digunakan telah memiliki izin edar resmi dan tercatat dalam database BPOM.

## AGUSTUS

### BPOM Raih Opini WTP 12 Kali Berturut-turut



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BPOM Tahun 2025 pada Senin (3/8/2026). Dalam penyerahan yang dilakukan di Kantor BPK tersebut, BPOM kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut sejak 2014. Penyerahan dilakukan Anggota VI BPK Fathan Subchi kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar, didampingi Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Laode Nusriadi dan Sekretaris Utama BPOM Jayadi.

Dalam sambutannya, Anggota VI BPK mengapresiasi komitmen serta kerja keras seluruh jajaran BPOM atas pencapaian tersebut. Ia mengatakan BPOM mencatatkan kinerja persentase tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan yang sangat baik, yakni mencapai 97,13%. Selain itu, dari 9 indikator BPOM yang mendukung prioritas nasional, 8 di antaranya (88,89%) berhasil mencapai target di atas 100%. "Opini WTP merupakan cerminan komitmen BPOM dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui penguatan tata kelola, sistem

pengendalian, dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan," ujar Fathan. Lebih lanjut, Fathan menekankan pentingnya optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai early warning system untuk pencegahan. Anggota VI BPK ini juga berpesan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan dan pengawasan dari BPK. Selain mempertahankan opini WTP, Taruna mengungkapkan bahwa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM mencapai nilai 97,94. "Pencapaian opini WTP selama 12 kali berturut-turut ini menjadi indikator penting dalam evaluasi reformasi birokrasi di BPOM. Capaian ini juga memperkuat posisi BPOM yang sebelumnya telah meraih pengakuan internasional sebagai WHO-Listed Authority, sebuah pengakuan sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju," jelas Taruna. Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan penyerahan dokumen LHP secara langsung oleh Anggota VI BPK kepada Kepala BPOM. Kegiatan kemudian diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus meningkatkan koordinasi dan tata kelola keuangan negara secara akuntabel dan transparan.

**BPOM Raih Predikat PKP-BJ Proaktif, Perkuat Tata Kelola Pengadaan yang Transparan dan Akuntabel**



BPOM meraih predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Level Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) BPOM dalam membangun tata kelola pengadaan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP Sarah Sadiqa kepada Kepala BPOM Taruna Ikrar, bersamaan dengan Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP Lantai Ground, Selasa (11/8/2026). Mengusung tema “Pengadaan Tanpa Batas”, kegiatan tersebut menjadi forum silaturahmi Kepala LKPP dengan pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/Pemda) dan Kepala UKPBJ se-Indonesia. Forum ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman bersama, menyelaraskan arah kebijakan, serta meneguhkan komitmen integritas dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Predikat tersebut mencerminkan perkembangan UKPBJ BPOM dalam memenuhi variabel kematangan UKPBJ hingga mampu menjalankan fungsi pengadaan secara lebih

proaktif dan berkualitas. Unit pengadaan BPOM tidak lagi sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi telah bertransformasi menjadi mitra strategis organisasi yang berorientasi pada kebutuhan pengguna serta melakukan pencegahan terhadap potensi permasalahan dalam proses pengadaan.

**BPOM Kawal Pemusnahan 1,3 Ton Ketamin Ilegal Bernilai Triliunan Rupiah**




Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri pemusnahan massal 1,3 ton ketamin ilegal senilai Rp2,6 triliun hingga Rp4,55 triliun di Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam, Kepulauan Riau, pada Rabu (12/8/2026). Kehadiran BPOM mempertegas langkah penuh pemerintah dalam mengawal benteng perlindungan masyarakat dari gempuran peredaran obat-obat tertentu (OOT) yang disalahgunakan. “Apa yang dilakukan oleh lintas sektoral hari ini merupakan salah satu prestasi pemerintah Presiden Prabowo yang telah mampu mengoordinasikan antara keterlibatan BPOM, BNN, Bakamla, TNI AL, dan Bareskrim untuk bersama-sama menumpas persoalan yang menjangkiti masyarakat, yaitu obat-obat tertentu, salah satunya adalah ketamin,” ungkap Kepala BPOM dalam konferensi pers tersebut.

Penyelundupan raksasa ini berhasil dibongkar setelah Kapal Republik Indonesia (KRI) Kerambit-627 mendeteksi kapal MV King Sun memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia di Perairan Utara Tanjung Berakit, Pulau Bintan, pada Kamis (6/8/2026). Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) KRI Kerambit-627 segera melakukan shadowing dan pemeriksaan kapal di laut, sebelum mengawalnya untuk sandar di dermaga Kodaeral IV. Di sana, tim gabungan TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Nasional (BIN), dan Kepolisian RI (Polri) melakukan pemeriksaan mendalam hingga menemukan 65 karung mencurigakan yang disembunyikan di bawah lantai kapal. “Melalui pemeriksaan dan investigasi yang diperkuat dengan digital forensik serta peralatan khusus milik Bea Cukai, 65 karung tersebut dipastikan berisi ketamin dengan estimasi berat 1,3 ton. Barang bukti tersebut diperkirakan memiliki nilai ekonomis sekitar Rp2,6 hingga 4,5 triliun. Atas penangkapan ini, diperkirakan sebanyak 13 juta jiwa terselamatkan dari penyalahgunaan obat terlarang,” ujar Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Dari kacamata medis, ketamin merupakan obat anestesi umum yang bekerja cepat untuk menghasilkan efek anestesi serta analgesik (penghilang rasa sakit) yang kuat. Namun di luar dosis medis, ketamin kerap disalahgunakan secara ilegal untuk mencari efek "rekreasional" berupa euforia atau rasa gembira berlebihan. Penyalahgunaan zat ini sangat berbahaya karena memberikan efek kehilangan kesadaran, gangguan memori permanen, serta sedasi ekstrem yang membuat korban tidak mampu melawan atau memahami kondisi sekitar.

## SEPTEMBER

**BPOM Targetkan Pengembangan Vaksin 100 Hari untuk Antisipasi Pandemi di Masa Depan**




Kepala BPOM Taruna Ikrar berkomitmen untuk mendorong akselerasi pengembangan vaksin dalam waktu 100 hari saat terjadi ancaman pandemi di masa depan. Gagasan tersebut disampaikan Taruna dalam Forum Table Top Exercise (TTX): "100 Days Mission in Indonesia Project" yang digelar oleh Kementerian Kesehatan bersama Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pada Kamis (3/9/2026). Misi 100 Hari (100 Days Mission/100DM) adalah sebuah tujuan ambisius yang dipelopori oleh CEPI dan didukung oleh negara-negara G7 dan G20, untuk mempercepat pengembangan vaksin terhadap ancaman baru dalam waktu singkat 100 hari. Berkaca dari pengalaman saat dunia menghadapi pandemi COVID-19, waktu 100 hari adalah sepertiga dari waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan vaksin COVID-19 pertama. Dengan begitu, vaksin dapat siap untuk memperoleh otorisasi awal dan diproduksi skala besar dalam waktu 100 hari sejak teridentifikasinya patogen pandemi.

Sesuai dengan tema kegiatan, target pengembangan vaksin dalam waktu 100 hari juga menjadi komitmen BPOM untuk mendukung terwujudnya kesiapsiagaan pandemi terintegrasi ke dalam sistem operasional dan kebijakan nasional. Taruna memastikan bahwa target tersebut akan dicapai dengan tetap mengedepankan standar keamanan, efikasi, dan mutu produk tanpa kompromi. Taruna menyatakan bahwa kesiapsiagaan harus dibangun jauh sebelum krisis kesehatan muncul. Melalui forum TTX, BPOM menguji skenario respons cepat untuk menjalankan serangkaian proses dari mengidentifikasi patogen potensial hingga distribusi vaksin.

**BPOM Percepat Akses Obat dan Perkuat Perlindungan Konsumen melalui Nutri-Level dan Kemasan Pangan**



BPOM terus mendorong transformasi regulasi untuk memastikan masyarakat memperoleh akses lebih cepat terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan inovatif tanpa mengurangi aspek keamanan, khasiat, dan mutu. Pada saat yang sama, BPOM memperkuat perlindungan masyarakat melalui penerapan Nutri-Level serta pembaruan regulasi keamanan kemasan pangan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan kinerja tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (9/9/2026). Dalam forum tersebut, Kepala BPOM menyampaikan 3 isu utama, yaitu percepatan akses terhadap obat, vaksin, dan produk kesehatan inovatif; implementasi Nutri-Level sebagai bagian dari pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL); serta penguatan kebijakan kemasan pangan. Taruna menegaskan bahwa kecepatan pelayanan regulatori harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat. Karena itu, BPOM menerapkan pendekatan berbasis risiko, mulai dari evaluasi izin edar, farmakovigilans, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium, inspeksi, hingga pelaksanaan uji klinik. “BPOM berkomitmen melakukan percepatan layanan tanpa menurunkan aspek keamanan, mutu, dan efikasi produk,” ujar Taruna. Menurutnya, prinsip regulatory innovation diterjemahkan BPOM ke dalam transformasi proses bisnis dengan menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan keamanan masyarakat. Intensitas pengawasan dan proses regulatori disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing produk.

Transformasi tersebut salah satunya dilakukan melalui digitalisasi proses bisnis, simplifikasi birokrasi, peningkatan transparansi, serta pemanfaatan mekanisme reliance dan harmonisasi dengan standar global. Status BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA) turut memperkuat posisi Indonesia dalam sistem regulatori global. Melalui mekanisme reliance, evaluasi dapat memanfaatkan hasil penilaian regulator mapan sebagai referensi, tetapi tetap melalui proses penilaian BPOM dan bukan merupakan pengakuan langsung. Untuk mempercepat akses masyarakat, BPOM menyediakan sejumlah jalur registrasi. Seperti emergency use authorization (EUA) memiliki target penyelesaian 20 hari kerja, obat pengembangan baru dan investasi di Indonesia 50 hari kerja, mekanisme reliance 90 hari kerja, serta jalur prioritas 100 hari kerja. Transformasi tersebut menunjukkan hasil nyata. Persentase penerbitan izin edar yang dapat diselesaikan lebih cepat dari timeline yang ditetapkan meningkat dari 70,6% pada 2024 menjadi 87,5% pada 2026. BPOM juga telah menyetujui 898 produk inovatif sepanjang tahun 2013–2026 sebagai bukti nyata percepatan BPOM. BPOM juga mengembangkan berbagai mekanisme untuk memperluas akses terhadap terapi inovatif, antara lain multi-regional clinical trial (MRCT), expanded access, hingga pengkajian skema conditional approval untuk produk advanced therapy medicinal products (ATMP). Menurut Taruna, kecepatan dan perlindungan bukan 2 hal yang harus dipertentangkan. Berbagai skema tersebut dirancang agar inovasi dapat lebih cepat diakses pasien dengan tetap mempertahankan standar keamanan dan mutu.

# 1 PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2) pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3) penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
4) pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
5) koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
7) pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
8) koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
9) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
10) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
11) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

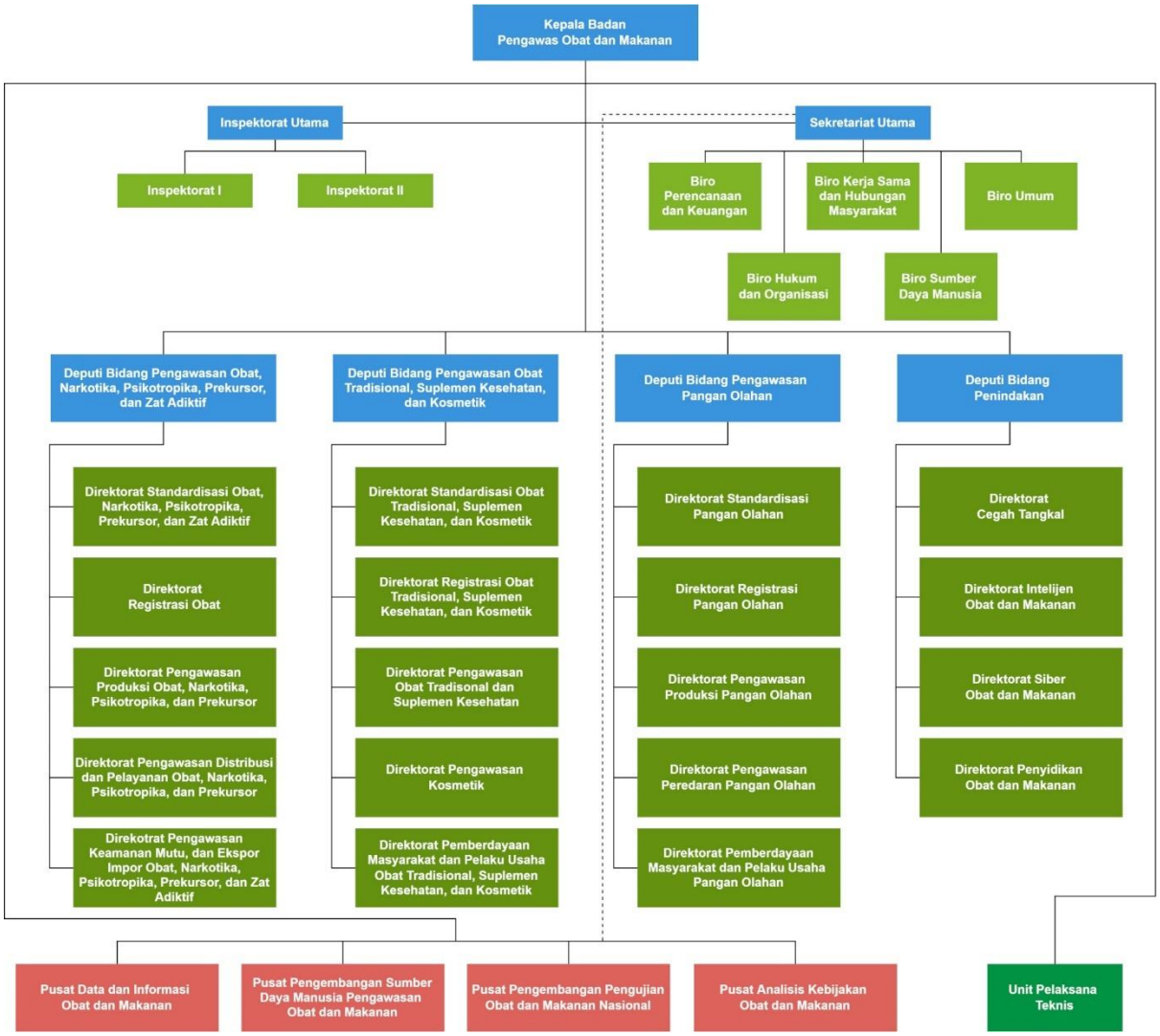
Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Obat dan Makanan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Obat Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, dan Inspektorat Utama. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:




**Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM**

## C. Mandat dan Peran Strategis

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. **Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM**

   Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

   a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

   b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya pencegahan PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/*Front of Pack Nutrition Labelling* (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih

sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. **Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi**

   Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

   a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan tingkat maturitas
   b. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
   c. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
   d. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
   e. Pengembangan jejaring laboratorium POM
   f. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar
   g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP
   h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
   i. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai Standar kemampuan Laboratorium
   j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi standar kompetensi
   k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
   l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka pelaporan KTD/ESO
   m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
   n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   o. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
   p. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
   q. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi

3. **Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan**

   Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (*traceability*) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM *Command Center* untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan.

Kesemua strategi nasional ini mencerminkan fokus BPOM dalam mendukung infrastruktur kesehatan publik yang tangguh, dengan mengintegrasikan kegiatan pengawasan ke dalam sistem kesehatan nasional secara lebih luas untuk mendukung kesehatan masyarakat.

## D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2025-2029.

**Bab II Perencanaan Kinerja**
Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**
Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan sampai dengan triwulan I tahun 2026, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

**Bab IV Penutup**
Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

**Lampiran**
Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

# 2 PERENCANAAN KINERJA

## A. Rencana Strategis 2025-2029

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 telah ditetapkan pada 7 Oktober 2025 melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025. Ini merupakan langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

### VISI

**Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama**
**Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**

# MISI

1. **Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat**
2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing**
3. **Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan**
4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

## Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**. Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**.
   Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat

untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM**.
   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**.
   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima**: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029**

| No | Tujuan | Indikator | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu | 74.75 | 76.4 | 77.75 | 79.45 | 80.7 |
| 2 | Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88.20 | 88.60 | 88.90 | 89.20 | 89.40 |

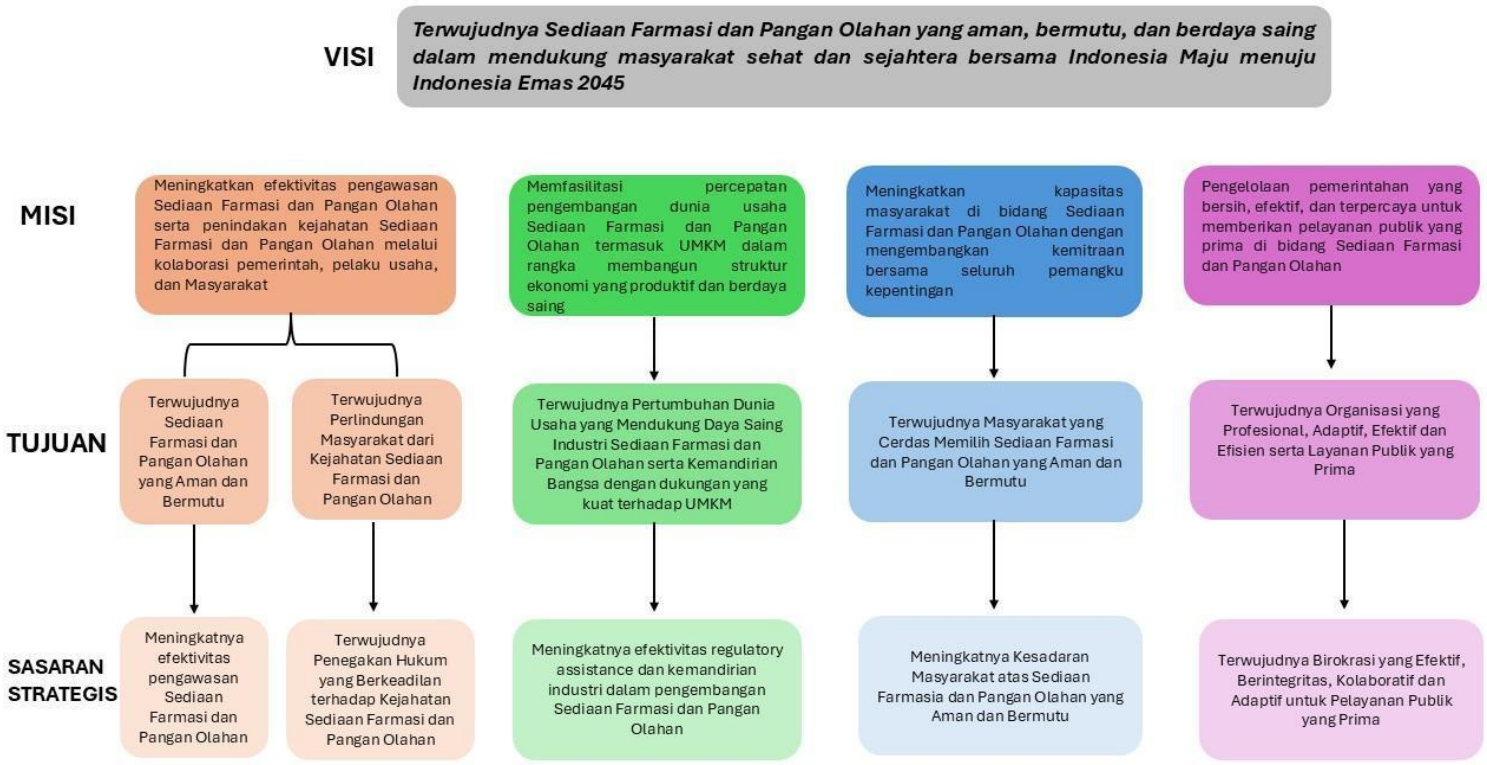
| No | Tujuan | Indikator | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | yang Aman dan Bermutu | | | | | | |
| 3 | Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM | Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 63.6 | 66.2 | 69.3 | 72.7 | 76.7 |
| 4 | Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 74.4 | 75.9 | 77.1 | 78.5 | 79.9 |
| 5 | Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima | Indeks RB BPOM | 96.3 | 96.35 | 96.4 | 96.45 | 96.5 |

## Sasaran Strategis

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BPOM, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BPOM telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025–2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan dengan mengarusutamakan gender dan inklusi sosial mulai dari perencanaan hingga evaluasinya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu
3. Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
4. Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Pemetaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2.1. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPOM 2025-2029 tercantum pada Renstra BPOM Tahun 2025-2029 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 28 tanggal 7 Oktober 2025. Matriks Renstra BPOM 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 1 | Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 72,5 | 73,8 | 75,5 | 76,9 | 78,4 |
| | | 2 | Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| | | 3 | Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 89,9 | 90,05 | 90,2 | 90,35 | 90,5 |
| | | 4 | Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 50,73 | 54,58 | 58,73 | 62,87 | 67,35 |

| Sasaran Strategis | | | Indikator Kinerja | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | 5 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 82,5 | 82,75 | 83 | 83,25 | 83,5 |
| | | 6 | Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan | 55,4 | 62,1 | 68,7 | 75,2 | 82,2 |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 7 | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88,2 | 88,6 | 88,9 | 89,2 | 89,4 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 8 | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 85,7 | 87,5 | 89,4 | 90,9 | 92,4 |
| | | 9 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 | 76 |
| | | 10 | Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 35 | 39,7 | 45,7 | 52,7 | 61,7 |
| 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 11 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 74,4 | 75,9 | 77,1 | 78,5 | 79,9 |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan | 12 | Indeks RB BPOM | 96,3 | 96,35 | 96,4 | 96,45 | 96,5 |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | | | | | | |

## B. Prioritas Nasional Tahun 2026

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, terdapat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.




Gambar 2.2. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

Dalam mendukung prioritas pembangunan tersebut, BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada **Prioritas Nasional (PN) 4 Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,**

**Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas**. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2025.

**Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2026 yang Terkait dengan BPOM**

| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas | Sasaran | Indikator | Baseline 2024 | Target 2026 | Koordinator/ Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.13<br>PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat | | | | | |
| 04.13.05<br>KP: Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM | 01- Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM | 07 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan | (indikator baru) | 77% | BPOM |
| 04.14<br>PP: Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan | 01- Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit emerging dan re-emerging, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara | 06 – Persentase Sediaan Farmasi aman dan bermutu | (indikator baru) | 73,8% | BPOM |

| Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas | Sasaran | Indikator | Baseline 2024 | Target 2026 | Koordinator/ Pengampu |
|---|---|---|---|---|---|
| | efektif dan cepat | | | | |
| 04.14.03<br>KP: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi | 01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi | 03 - Persentase kab/kota Pangan Aman | 13% (2023) | 28% | BPOM |
| | | 04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu | 77,8% (2023) | 79% | BPOM |
| | | 05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu | 73,3% (2023) | 76% | BPOM |
| | | 06 - Persentase obat yang aman dan bermutu | (indikator baru) | 91% | BPOM |
| | | 07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu | (indikator baru) | 66% | BPOM |
| | | 08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu | (indikator baru) | 70% | BPOM |
| | | 09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu | (indikator baru) | 63% | BPOM |

*Sumber: Lampiran II Perpres Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026*

## C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2026

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2026, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rencana Kinerja BPOM Tahun 2026**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 1 | Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu | 73,8 |
| | | 2 | Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu | 79 |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| | | 3 | Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | 90,05 |
| | | 4 | Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | 54,58 |
| | | 5 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan | 82,75 |
| | | 6 | Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 62,1 |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 7 | Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu | 88,6 |
| 3 | Meningkatnya Efektifitas *Regulatory Assistance* dan Kemandirian Industri dalam Pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 8 | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 87,5 |
| | | 9 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan | 71,5 |
| | | 10 | Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 39,7 |
| 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan Terhadap kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 11 | Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 75,9 |
| 5 | Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima | 12 | Indeks RB BPOM | 96,35 |

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2026 secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2026**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Frekuensi Pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 1.1 | Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 76,50 | Bulanan |
| | | 1.2 | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 87,50 | Bulanan |
| | | 1.3 | Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 95,48 | Tahunan |
| | | 1.4 | Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 55,39 | Tahunan |
| | | 1.5 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81 | Tahunan |
| | | 1.6 | Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 63,60 | Bulanan (mulai B03) |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 2.1 | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 89,19 | Tahunan |
| 3 | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 3.1 | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 88,53 | Tahunan |
| | | 3.2 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 77,50 | Bulanan (mulai B07) |
| | | 3.3 | Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 37,17 | Tahunan |
| 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 4.1 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81,66 | Bulanan (mulai B03) |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, | 5.1 | Indeks RB BPOM | 95,97 | Tahunan |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Frekuensi Pelaporan |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | | | | |

## Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Sehubungan dengan telah disahkannya usulan Revisi DIPA Satuan Kerja BPOM Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran TA 2026 dalam rangka Penajaman Belanja yang database-nya telah diperbaharui pada RKAKL/DIPA BPOM, terdapat penyesuaian alokasi dan target Rincian Output (RO) pada beberapa kegiatan. Penyesuaian target RO tersebut mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM, dapat dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2026. Revisi PK BPOM ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2026.

Pada revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026, terdapat perubahan pada 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis sebagai berikut:

| Nama Indikator | Target | | Justifikasi |
|---|---|---|---|
| | Sebelum | Menjadi | |
| Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81,11 | 81,66 | Perubahan target indikator ini disebabkan oleh penyesuaian target salah satu komponen pengukurannya, yaitu Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal, agar selaras dengan realisasi IKSK Direktorat di bawahnya. |

## E. Pagu Anggaran BPOM

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2026, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.247.043.158.000,00 (Dua Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah). Anggaran ini termasuk Rincian Output ZZ1-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden sebesar Rp196.082.350.000,00. Pada tanggal 29 Juli 2026 dilakukan revisi PK BPOM. Revisi dilakukan karena terdapat penyesuaian alokasi dan target Rincian Output

(RO) pada beberapa kegiatan yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi. Hal ini berpengaruh signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Perubahan tersebut berdampak pada berkurangnya pagu BPOM menjadi Rp1.949.368.991.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Alokasi Anggaran BPOM per Program**

| No | Program | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| **1** | Program Dukungan Manajemen | 1.469.554.611.000,00 |
| **2** | Program Pengawasan Obat dan Makanan | 479.814.380.000,00 |
| **Total** | | **1.949.368.991.000,00** |

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BPOM per Indikator**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 1.1 | Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 76,50 | 38.395.549.000,00 |
| | | 1.2 | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 87,50 | 16.466.206.500,00 |
| | | 1.3 | Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 95,48 | 7.187.019.000,00 |
| | | 1.4 | Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 55,39 | 17.137.119.500,00 |
| | | 1.5 | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81 | 37.347.165.500,00 |
| | | 1.6 | Persentase penguatan laboratorium pengawasan | 63,60 | 241.709.300.000,00 |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | | |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 2.1 | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 89,19 | 37.555.232.000,00 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 3.1 | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 88,53 | 3.015.378.000,00 |
| | | 3.2 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 77,50 | 5.688.120.500,00 |
| | | 3.3 | Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 37,17 | 3.616.550.000,00 |
| 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 4.1 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81,66 | 28.203.159.000,00 |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | 5.1 | Indeks RB BPOM | 95,97 | 1.513.048.192.000,00 |

Terdapat perbedaan target yang ditetapkan pada beberapa IKSS yang tercantum pada dokumen Renstra, RKT, dan PK tahun 2026, dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7. Perbandingan Target Renstra, RKT, dan PK BPOM Tahun 2026**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Renstra | RKT | PK |
| 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 73,8 | 73,8 | 76,50 |
| | | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 79 | 79 | 87,50 |
| | | Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 90,05 | 90,05 | 95,48 |
| | | Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 54,58 | 54,58 | 55,39 |
| | | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 82,75 | 82,75 | 81 |
| | | Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 62,1 | 62,1 | 63,60 |
| 2 | Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu | 88,6 | 88,6 | 89,19 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 87,5 | 87,5 | 88,53 |
| | | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 71,5 | 71,5 | 77,50 |
| | | Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 39,7 | 39,7 | 37,17 |
| 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 75,9 | 75,9 | 81,66 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target Tahun 2026 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Renstra | RKT | PK |
| | Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | | | |
| 5 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | Indeks RB BPOM | 96,35 | 96,35 | 95,97 |

Perbedaan target antara dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan konsekuensi logis dari perbedaan waktu penyusunan, ketersediaan informasi, serta tingkat kepastian sumber daya pada masing-masing tahap perencanaan.

Pertama, RKT disusun pada tahun n-1 sebagai bagian dari proses perencanaan awal. Pada tahap ini, penetapan target masih bersifat proyeksi dan menggunakan asumsi makro terkait kebutuhan program, perkiraan kapasitas pelaksanaan, serta estimasi pagu indikatif. Karena disusun sebelum tahun anggaran berjalan, RKT belum sepenuhnya mempertimbangkan dinamika kebijakan terbaru, perubahan prioritas nasional, maupun kondisi riil pelaksanaan tahun sebelumnya yang mungkin belum final. Sedangkan PK disusun pada tahun n setelah DIPA tahun berjalan ditetapkan. Dengan telah ditetapkannya alokasi anggaran definitif, organisasi memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kapasitas riil sumber daya—baik anggaran, SDM, maupun dukungan operasional. Kondisi ini memungkinkan penyesuaian target agar lebih realistis dan selaras dengan kemampuan pelaksanaan. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran, penyesuaian tersebut menjadi penting agar target tetap kredibel, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar ambisi perencanaan awal.

Selain itu perbedaan juga dipengaruhi oleh penggunaan data *baseline*. RKT umumnya masih menggunakan data historis yang tersedia pada saat perencanaan, yang dalam beberapa kasus belum mencerminkan capaian akhir tahun berjalan. Sementara itu, PK telah menggunakan data yang lebih mutakhir (*updated baseline*), termasuk realisasi kinerja tahun sebelumnya yang sudah final atau hasil evaluasi terkini. Dengan baseline yang lebih akurat, target dalam PK menjadi lebih presisi dan berbasis kondisi aktual.

Dengan demikian, perbedaan target antara RKT dan PK bukanlah bentuk inkonsistensi perencanaan, melainkan bentuk penyesuaian rasional dan adaptif terhadap perkembangan data serta ketersediaan sumber daya. Penyesuaian ini justru mencerminkan penerapan prinsip perencanaan kinerja yang dinamis, berbasis data, dan

akuntabel, sehingga target yang ditetapkan dalam PK lebih mencerminkan komitmen kinerja yang realistis sekaligus menantang pada tahun berjalan.

## F. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Perhitungan capaian indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

**%Capaian = (Realisasi/Target) x 100%**

Kriteria pencapaian IKSS berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM sebagai berikut:

**Tabel 2.8. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

| Kategori | Capaian IKU | Notifikasi Warna | Kesimpulan Efektivitas |
|---|---|---|---|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110% | | - |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | | Sangat Efektif |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | | Efektif |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | | Kurang Efektif |
| Kurang | <60% | | Tidak Efektif |

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. Normalisasi dilakukan pada IKSP dengan capaian >110% maka dinormalisasi menjadi 110%. Perhitungan NKO periodik sebagai berikut:

**Tabel 2.9. Perhitungan NKO Periodik**

| No | Sasaran | Indiktor Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (1) | Normalisasi Capaian PK (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| Total Capaian PK (3) | | | | | | |
| Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK) (4) | | | | | | |

| No | Sasaran | Indiktor Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (1) | Normalisasi Capaian PK (2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Predikat NKO (5) | |

Keterangan:

(1) = (realisasi/target)x100%

(2) = IKSP >110% dinormalisasi menjadi 110%.

(3) = penjumlahan kolom (2)

(4) = (3) dibagi dengan jumlah IKSP

Predikat NKO sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.12. Predikat NKO**

| Predikat | NKO | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| **Istimewa** | >100% | |
| **Baik** | 80% < x ≤ 100% | |
| **Butuh Perbaikan** | 60% < x ≤ 80% | |
| **Kurang** | 20% < x ≤ 60% | |
| **Sangat Kurang** | 0% ≤ x ≤ 20% | |

Untuk melakukan prediksi terhadap status capaian kinerja triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026, digunakan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 2.13. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 Terhadap Target Akhir Tahun 2026**

| Notifikasi | Kriteria | Nilai |
|---|---|---|
| | Tercapai/Melampaui | ≥100% |
| | Akan Tercapai | 70%≤x<100% |
| | Perlu Upaya Keras | <75% |

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu program/kegiatan akan mencapai target di akhir tahun atau sudah mencapai target akhir tahun atau perlu upaya keras dalam mencapai target akhir tahun.

# 3 AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Indikator BPOM terhadap Program Prioritas Nasional Bidang Kesehatan

Sebagai lembaga pengawas obat dan makanan, BPOM memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional (PN) bidang kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya pada Program Prioritas Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat serta Program Prioritas Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan. Melalui fungsi pengawasan sebelum dan selama beredar terhadap obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan, BPOM berkontribusi langsung terhadap terwujudnya masyarakat yang hidup sehat serta terjaminnya ketahanan kesehatan nasional, sejalan dengan arahan Presiden dalam Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan kesehatan.

Dalam mewujudkan Prioritas Nasional tersebut, BPOM berkontribusi sebagai instansi pelaksana pada sejumlah indikator dalam Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) bidang kesehatan. Pada Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator BPOM pada 2 (dua) Kegiatan Prioritas (KP), yaitu KP Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), yang berada di bawah Program Prioritas Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat; serta KP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi beserta 1 (satu) indikator langsung, yang keduanya berada di bawah Program Prioritas Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan.

1. **KP Pembudayaan Hidup Sehat dan Pengendalian Faktor Risiko PTM**
   Pada Kegiatan Prioritas ini, BPOM berkontribusi melalui indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Memenuhi Ketentuan. Realisasi Triwulan III 2026 mencapai 80,04% dari target 77,00%, atau setara kinerja 103,95%.

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2026 | Realisasi TW III 2026 | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|
| Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan | 79,91 | 77,00 | 80,04 | 103,95% |

Meskipun indikator ini sudah mencapai target, namun masih terdapat kendala/hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan kinerja antara lain:

1) Adanya implementasi ketentuan pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik sesuai PP Nomor 28 Tahun 2024 yang dimulai pada 27 Juli 2026 berpotensi memengaruhi capaian *output*. Produk tembakau dan rokok elektronik yang beredar di pasaran sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan pada PP Nomor 28 Tahun 2024.
2) Peraturan teknis turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan yang berpengaruh pada penerapan ketentuan baru secara menyeluruh.
3) Pemahaman dan keseragaman penilaian hasil pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik oleh UPT BPOM masih perlu ditingkatkan, terutama dengan adanya masa transisi evaluasi menggunakan ketentuan sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2024. Perbedaan interpretasi terhadap hasil pengawasan berpotensi menyebabkan perbedaan penilaian antar petugas UPT BPOM dan Pusat. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi ulang dari hasil pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik yang dilaporkan oleh UPT BPOM untuk memastikan kesesuaian hasil pengawasan dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut akan dilakukan beberapa hal diantaranya:

a) Melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru kepada industri/importir produk tembakau dan rokok elektronik secara lebih masif mengenai ketentuan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi lainnya pada label kemasan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan.
b) Melaksanakan bimbingan teknis pengawasan produk tembakau dan rokok elektronik dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik guna membahas mengenai peraturan terbaru kepada petugas pengawasan di UPT BPOM.
c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik yang dilakukan oleh UPT BPOM untuk memastikan pelaporan secara lengkap dan ketepatan waktu pelaporan.
d) Berpartisipasi aktif dalam penyusunan peraturan teknis turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai dasar penguatan strategi pengawasan dan penyesuaian kebijakan sesuai perkembangan regulasi.

**2. PP Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan**

Pada Program Prioritas ini, BPOM berkontribusi langsung melalui indikator Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu, dengan realisasi Triwulan III 2026 sebesar 75,90% dari target 76,50% (kinerja 99,22%). Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2026 | Realisasi TW III 2026 | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 80,24 | 76,50 | 75,90 | 99,22% |

Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 75,90%. Dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 76,5%, capaian indikator adalah 99,22% dengan kategori "Baik". Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain:

a. Masih ditemukannya pelaku usaha, baik yang memasarkan produk secara daring maupun yang bertindak sebagai importir, yang mengedarkan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sebagaimana terungkap melalui kegiatan intensifikasi pengawasan.
b. Untuk komoditi kosmetik, tingkat kepatuhan sarana produksi masih rendah dari 165 sarana yang diperiksa pada Januari–September 2026 (91,67% dari target 180 sarana), 42 sarana (25,45%) tidak memenuhi ketentuan. Pada sarana tersebut, proporsi temuan kritikal (TIE) mencapai 59,52%, meningkat dari 57% pada Agustus, antara lain berupa produksi tanpa izin edar atau dengan NIE kedaluwarsa, formula yang tidak sesuai data notifikasi, dan fasilitas produksi yang tidak sesuai data notifikasi.
c. Evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan.

Beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

1) Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan
2) Pelaksanaan progresif untuk menindaklanjuti temuan produk yang tidak aman dan bermutu dan upaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha

**3. KP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi**

KP ini memuat 7 (tujuh) indikator yang menjadi tanggung jawab BPOM, mencakup pengawasan pangan olahan, PIRT, obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, serta koordinasi program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA). Rincian capaian disajikan pada tabel berikut.

| Indikator | Baseline 2025 | Target 2026 | Realisasi TW III 2026 | Capaian Kinerja (%) |
|---|---|---|---|---|
| Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman | 9,92 | 28,00 | Diukur TW IV 2026 | – |
| Persentase Pangan Olahan yang aman dan bermutu | 88,76 | 90,00 | 90,69 | 100,77% |
| Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang aman dan bermutu | 84,53 | 85,00 | 83,29 | 97,99% |
| Persentase Obat yang aman dan bermutu | 96,18 | 95,00 | 95,71 | 100,75% |
| Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu | 70,03 | 66,00 | 69,17 | 104,81% |
| Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu | 82,58 | 75,00 | 72,71 | 96,95% |
| Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu | 67,88 | 65,00 | 60,19 | 92,60% |

Selain mendukung Prioritas Nasional di atas, BPOM juga diamanatkan menjamin aspek keamanan dan mutu dalam Program MBG sebagaimana tertuang dalam Perpres 115 Tahun 2025, yang mencakup:

1) **Pengawasan Bahan Baku Pangan Olahan**
   BPOM diamanatkan untuk melakukan **pengawasan terhadap bahan baku berupa pangan olahan** yang digunakan dalam program ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen pangan olahan yang masuk ke dalam rantai pasok telah memenuhi standar keamanan pangan agar terhindar dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang membahayakan kesehatan.
2) **Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi**
   BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan **pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi** makanan bergizi gratis. Pengawasan ini dilakukan secara **sewaktu-waktu** untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang terlibat dalam pengolahan hingga penyaluran makanan tetap konsisten dalam menerapkan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan.
3) **Pengawasan Produk Akhir (Makanan Bergizi Gratis)**
   Selain bahan baku dan sarana, BPOM juga bertugas mengawasi **produk akhir berupa makanan bergizi gratis** yang akan dikonsumsi oleh kelompok sasaran. Sama seperti pengawasan sarana, pemantauan terhadap produk jadi ini dilakukan secara **sewaktu-waktu** guna memitigasi risiko kesehatan secara dini.

Pada tahun 2026 telah ditetapkan 1 (satu) Rincian Output (RO), yaitu Laporan Surveilan dan Deteksi Dini Insiden Keamanan Pangan MBG. Laporan ini berfungsi sebagai instrumen deteksi dini terhadap insiden keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk Kejadian Luar Biasa Keamanan Pangan (KLB KP), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan surveilan dan deteksi dini dalam laporan ini diharapkan dapat mendukung upaya identifikasi secara cepat terhadap potensi bahaya atau kejadian yang dapat mengancam keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG. Hingga triwulan III ini sudah disusun 31 laporan (80%) dari 40 laporan yang ditargetkan.

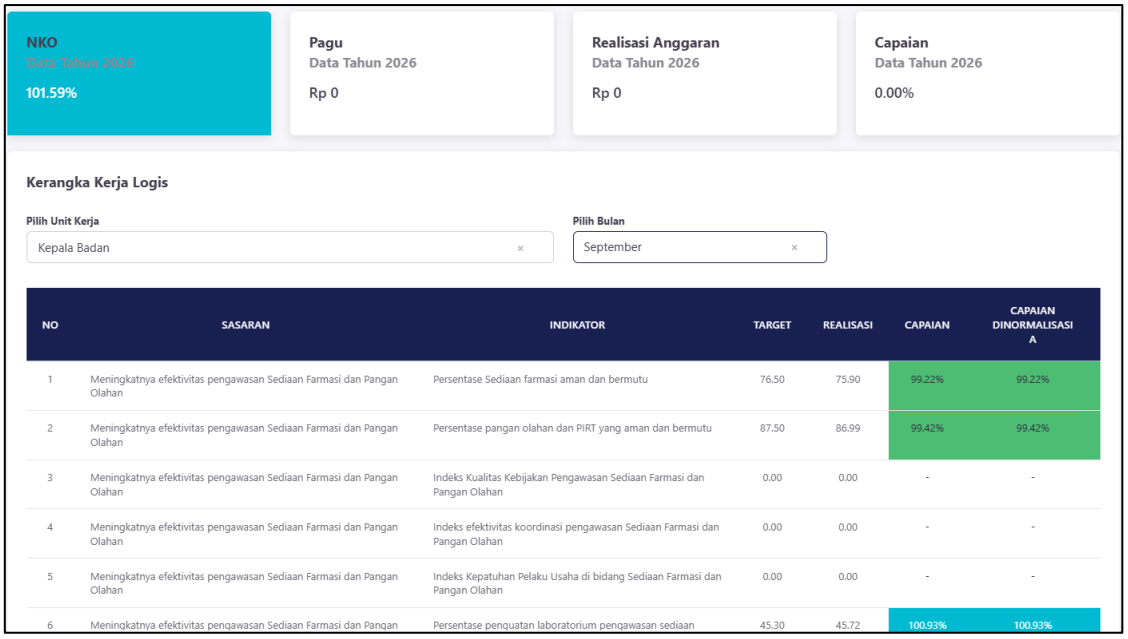
| Rincian Output | Target 2026 | Realisasi Triwulan III-2026 | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| Laporan Surveilan dan Deteksi Dini Insiden Keamanan Pangan MBG | 40 | 31 | 80% |

Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam menghasilkan laporan tersebut antara lain:

- Pembahasan hasil penelusuran KLB KP MBG bersama pakar
- *Tactical Floor Game (TFG)* Pengawalan Keamanan Pangan MBG di D.I Yogyakarta
- Konsolidasi Teknis Persiapan Pelaksanaan Pengawalan Keamanan Pangan Program MBG di Bali

## B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja BPOM Triwulan III tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan September tahun 2026. Dari 5 (lima) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, pada Triwulan III Tahun 2026 dilakukan pengukuran pada 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM (NKO) triwulan III tahun 2026 sebesar **101,59** dengan kriteria **Istimewa (sumber aplikasi SIMETRIS e-Performance)**. Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.




Gambar 3.1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPOM Triwulan III Tahun 2026

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2026**

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | | Target Tahunan | Capaian Kinerja Triwulan III | | | Notifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi | % | |
| SS 1 | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | IKSS1.1 | Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu | 76,5 | 76,5 | 75,90 | 99,22 | Baik |
| | | IKSS1.2 | Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 87,5 | 87,5 | 86,99 | 99,42 | Baik |
| | | IKSS1.3 | Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan | 63,6 | 45,3 | 45,72 | 100,93 | Sangat Baik |
| SS 3 | Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan | IKSS3.2 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan | 77,5 | 54 | 62,62 | 115,97 | Tidak Dapat Disimpulkan |

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | | Target Tahunan | Capaian Kinerja Triwulan III | | | Notifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target | Realisasi | % | |
| | pangan olahan | | | | | | | |
| SS 4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | IKSS4.1 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81,66 | 71,44 | 70,30 | 98,40 | Baik |
| | **NKO** | | | **101,59%** | | | | Istimewa |

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

| Kategori | Capaian IKU | Notifikasi Warna |
|---|---|---|
| Tidak Dapat Disimpulkan | >110% | |
| Sangat Baik | 100% < x ≤ 110% | |
| Baik | 90% < x ≤ 100% | |
| Cukup | 60% ≤ x ≤ 90% | |
| Kurang | <60% | |

## C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

### 1. Sasaran Strategis

#### Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung

pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif.

Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu; (2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu; (3) Indeks Kualitas Kebijakan di Bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; (5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; dan (6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan.

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

**1) Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu (IKSS 1.1)**

Sediaan Farmasi yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sedangkan aman dan bermutu adalah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\%\ sediaan\ farmasi\ yang\ aman\ dan\ bermutu = \frac{Jumlah\ Sampel\ targeted\ aman\ dan\ bermutu}{Jumlah\ Sampel\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \text{ x } 100\%$$

Penetapan bobot untuk sediaan farmasi sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Obat: 0,302 | Kosmetik: 0,231 |
| Obat Bahan Alam (OBA): 0,243 | Suplemen Kesehatan: 0,224 |

Hingga triwulan III tahun 2026 jumlah sediaan farmasi yang telah diperiksa dan diuji adalah sebanyak 27.064 sampel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sedian Farmasi per Komoditi**

| *Komoditi* | *Jumlah Sampel Aman dan Bermutu* | *Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji* | *%* | *Bobot Komoditi* | *Hasil Perkalian Bobot* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Obat* | 7.786 | 8.135 | 95,71 | 0,302 | 28,90% |
| *Obat Bahan Alam* | 4.205 | 6.079 | 69,17 | 0,243 | 16,81% |
| *Suplemen Kesehatan* | 1.223 | 1.682 | 72,71 | 0,224 | 16,29% |
| *Kosmetik* | 6.722 | 11.168 | 60,19 | 0,231 | 13,90% |
| ***Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu*** | | | | | **75,90%** |

Berdasarkan tabel di atas, persentase sediaan farmasi yang dinyatakan aman dan bermutu mencapai 75,90%, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan mutu produk yang beredar berada pada kategori cukup baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan. Berdasarkan komoditi, obat menunjukkan tingkat pemenuhan tertinggi dengan persentase 95,71% yang mencerminkan efektivitas pengawasan pada sektor obat yang relatif lebih mapan dari sisi regulasi dan sistem kendali mutu. Sebaliknya, kosmetik dan obat bahan alam memiliki persentase pemenuhan yang lebih rendah, masing-masing 60,19% dan 69,17%. Sementara itu, suplemen kesehatan menunjukkan capaian 72,71%, relatif lebih baik namun tetap memerlukan penguatan pengawasan.

**Tabel 3.3 Capaian Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu**

| **Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target 2026 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | B07 | | | B08 | | | B09 | | | Kategori | Capaian Terhadap Target 1 Tahun | |
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | % | Kategori |
| 76,5 | 80,08 (4.981 sampel) | 76,63 (15.582 sampel) | 76,5 | 76,18 | 99,58 | 76,5 | 76,49 | 99,99 | 76,5 | 75,90 (27.064 sampel) | 99,22 | Baik | 99,22 | Akan Tercapai |

Realisasi sampel sediaan farmasi yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 75,90%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2026 sebesar 76,5%, capaian indikator adalah 99,22% dengan kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I dan II (80,08%) terdapat penurunan sebesar 4,18 poin. Hal ini disebabkan jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini

dapat berubah pada triwulan berikutnya. Begitu juga jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 99,22% dengan kategori “Akan Tercapai”.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator ini antara lain:

a. Masih ditemukannya pelaku usaha, baik yang memasarkan produk secara daring maupun yang bertindak sebagai importir, yang mengedarkan produk suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sebagaimana terungkap melalui kegiatan intensifikasi pengawasan.
b. Untuk komoditi kosmetik, tingkat kepatuhan sarana produksi masih rendah dari 165 sarana yang diperiksa pada Januari–September 2026 (91,67% dari target 180 sarana), 42 sarana (25,45%) tidak memenuhi ketentuan. Pada sarana tersebut, proporsi temuan kritikal (TIE) mencapai 59,52%, meningkat dari 57% pada Agustus, antara lain berupa produksi tanpa izin edar atau dengan NIE kedaluwarsa, formula yang tidak sesuai data notifikasi, dan fasilitas produksi yang tidak sesuai data notifikasi.
c. Evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan III untuk mendukung capaian indikator ini antara lain:

1) Intensifikasi Tindak Lanjut Pengawasan Mutu Obat Termasuk Obat Tuberkulosis Beredar
2) Forum Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan Mutu Obat Termasuk Obat Tuberkulosis Beredar
3) Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan agar pelaksanaan sampling sesuai dengan pedoman samping dan rencana alokasi
4) Pelaksanaan progresif dalam menindaklanjuti temuan obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang tidak aman dan bermutu untuk peningkatan kepatuhan pelaku usaha

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

a) Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT
b) Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan
c) Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor

Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

**Tabel 3.4 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko**

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode/Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan sampling berbasis risiko belum sepenuhnya optimal sesuai ketentuan, dipengaruhi oleh pengetatan anggaran, keterbatasan kapasitas sumber daya, serta belum meratanya pemahaman dan harmonisasi pelaksanaan di seluruh UPT. | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi pengawasan mutu, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi pengawasan mutu, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. | s.d TW IV 2026 | Y | S 020/ Tidak terlaksananya pengawasan keamanan, mutu, label dan ekspor impor ONPPZA<br><br>SDM 017 : Implementasi sampling dan pengujian obat oleh petugas UPT BPOM tidak sesuai dengan standar dan ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Sampling yang berlaku |
| 2 | Evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan | Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. | 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sampling dan pengujian dan penandaan oleh UPT untuk memastikan pencapaian target, serta mengarahkan pelaksanaan sampling agar diprioritaskan pada produk kosmetik berisiko tinggi.<br>2. Forum Koordinasi Sampling dan pengujian | TW 4 | Y | S-01/44 Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang. |

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Kode/Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Serta Penandaan Pada TW 4<br>3. Monev dan tindak lanjut ke pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensi dan kepatuhan secara berkala. | | | |

**2) Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu (IKSS 1.2)**

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai Pangan Olahan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan Pangan Olahan atau minuman. Pangan Olahan (PO) adalah Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

Pangan Industri rumah tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi IRTP. Kriteria PIRT Tidak Aman dan bermutu adalah PIRT TIE dan/ atau Kedaluwarsa dan/ atau rusak dan/ atau tidak memenuhi syarat pengujian berdasarkan standar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\%\ \boldsymbol{PO\ dan\ PIRT\ \ aman\ dan\ bermutu} = \frac{\%\ \boldsymbol{PO\ aman\ dan\ bermutu} + \%\ \boldsymbol{PIRT\ aman\ dan\ bermutu}}{\mathbf{2}}$$

$$\%\ Pangan\ Olahan\ aman\ dan\ bermutu = 100\% - \%\ Pangan\ Olahan\ tidak\ aman\ dan\ bermutu$$

$$\%\ PIRT\ aman\ dan\ bermutu = 100\% - \%\ PIRT\ tidak\ aman\ dan\ bermutu$$

$$\%\ PO\ tidak\ aman\ dan\ bermutu = \frac{(Sampel\ PO\ TIE + PO\ Rusak + PO\ Kedaluwarsa + TMS\ Pengujian)}{Total\ sampel\ PO}\ x\ 100\%$$

$$\%\ PIRT\ tidak\ aman\ dan\ bermutu = \frac{(Sampel\ PIRT\ TIE + PIRT\ Rusak + PIRT\ Kedaluwarsa + TMS\ Pengujian)}{Total\ sampel\ PIRT}\ X\ 100\%$$

**Tabel 3.5 Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Pangan Olahan dan PIRT**

| *Komoditi* | *Jumlah Sampel Aman dan Bermutu* | *Jumlah Sampel yang Diperiksa dan Diuji* | *% Sampel Aman dan Bermutu* |
|---|---|---|---|
| *Pangan Olahan* | 9.000 | 9.924 | 90,69% |
| *PIRT* | 1.057 | 1.269 | 83,29% |
| ***Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu*** | | | **86,99%** |

Berdasarkan tabel di atas terlihat persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu hingga triwulan III adalah 86,99% dari total sampel sebanyak 11.193. Kontribusi terbesar yang mendukung capaian ini adalah produk pangan olahan dengan 90,69% sedangkan PIRT sebesar 83,29% dari 1.269 sampel yang diperiksa dan diuji.

**Tabel 3.6 Capaian Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu**

| **Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu** | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target 2026 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | B07 | | | B08 | | | B09 | | | Kategori | Capaian Terhadap Target 1 Tahun | |
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | % | Kategori |
| 87,5 | 84,23 (2.487 sampel) | 87,53 (6.552 sampel) | 87,5 | 87,18 | 99,64 | 87,5 | 87,19 | 99,65 | 87,5 | 86,99 (11.193 sampel) | 99,42 | Baik | 99,42 | Akan Tercapai |

Realisasi sampel pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu sampai dengan triwulan III (B09) sebesar 86,99%. Dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2026 sebesar 87,5%, capaian indikator adalah 99,42% dengan kategori "Baik". Jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan I dan II (84,23% dan 87,53%), terdapat fluktuasi data persetase pangan olahan dan pirt yang aman dan bermutu seiring dengan bertambahnya jumlah sampel yang periksa san diuji. Namun demikian jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian dari total sampel

yang telah diperiksa dan diuji, sehingga realisasi ini dapat berubah pada triwulan berikutnya. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun, yang merupakan rata-rata dari target Triwulannya maka capaian realisasi indikator ini terhadap target tahunannya adalah 99,42% dengan kategori "Akan Tercapai".

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya indikator ini antara lain:

a. Perubahan target sampel PIRT di seluruh UPT BPOM karena efisiensi anggaran, menyebabkan implementasi penerapan *risk based* sampling di UPT BPOM belum optimal
b. Masih terdapat beberapa sampel yang belum dilaporkan UPT BPOM di SIPT. Salah satu penyebabnya diantaranya kerusakan alat laboratorium dll.
c. Minimnya kepatuhan Feedback pelaku usaha/ dinas kesehatan terkait dalam menindaklanjuti hasil pengawasan PIRT.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase pangan olahan dan PIRT yang Aman dan Bermutu yaitu:

1) Melakukan pendampingan teknis kepada seluruh UPT utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep Pedoman Sampling
2) Tindak Lanjut produk TMS berbasis kajian risiko, paralel dengan desk reviu pengujian oleh P3OMN dan UPT
3) Penerbitan surat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sampling dan uji ke UPT secara berkala
4) Kegiatan bimtek/pendampingan dalam rangka post market PIRT termasuk penilaian Mandiri Pengawasan Post Market PIRT Kab/Kota
5) Monev hasil sampling dan pengujian termasuk tindak lanjut hasil pengawasan kepada UPT BPOM dan Pemerintah Daerah.

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ini diantaranya:

a) Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT
b) Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan
c) Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar

Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

**Tabel 3.4 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko**

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perubahan target sampel PIRT di seluruh | Melakukan monitoring dan evaluasi hasil | Melakukan monitoring dan evaluasi hasil | TW 4 | Y | S.05. Beredarnya Produk |

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | UPT BPOM karena efisiensi anggaran, menyebabkan implementasi penerapan risk based sampling di UPT BPOM belum optimal | pengawasan dan tindak lanjut PIRT | pengawasan dan tindak lanjut PIRT | | | Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) yang tidak aman dan tidak bermutu.<br><br>Peristiwa risiko pada level Direktorat: Ketidaksesuaian pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT terhadap pedoman sampling |

**3) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.3)**

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga ataupun Pemerintah Daerah. Kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan Pembangunan Strategis untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian, meliputi peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan.

Setiap Instansi Pemerintah menyampaikan 3 (tiga) kebijakan untuk pengukuran indeks dengan kriteria:

a. Mengatur kepentingan dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas
b. Telah ditetapkan dan telah diimplementasikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelum tahun pengukuran

Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri dari:

1) Profil (10%)
2) Perencanaan Kebijakan (20%)
3) Implementasi Kebijakan (25%)
4) Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan (30%)
5) Transparansi dan Partisipasi Publik (15%)

Nilai indeks kualitas kebijakan ini dikategorikan dalam 5 (lima) kelompok, yaitu:
91,00 – 100 : unggul
80,00 – 90,99 : sangat baik
65,00 – 79,99 : baik
50,00 – 64,99 : cukup
≤ 50,00 : kurang baik

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

**4) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.4)**

Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan indikator yang bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas BPOM dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator ini diukur melalui beberapa komponen yaitu:
1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen A)
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (komponen B)
3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan (oleh UPT) yang ditindaklanjuti oleh stakeholder (komponen C)
4. Persentase Kabupaten/Kota Sadar Jamu Aman (komponen D)
5. Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman (komponen E)
6. Persentase Kerjasama yang Efektif (komponen F)

$$\text{Indeks Efektifitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan} : \frac{A + B + C + D + E + F}{6}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026. Meskipun demikian beberapa kegiatan telah dilakukan dalam rangka pencapaian komponen indikator Persentase Kabupaten/Kota Pangan Aman, diantaranya:

a) Menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penilai KKPA internal dan eksternal: Penetapan SK Tim KKPA 2026 oleh Deputi
b) Pelaksanaan Desk Konsultasi Data Dukung Program KKPA Tahun 2026
c) Forum Penguatan Sinergi dan Percepatan Program Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 bekerjasama dengan Kemendagri dan mengundang Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia
d) Permohonan Surat Kawat Kemendagri dalam rangka Percepatan dan Optimalisasi Pengisian Instrumen Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026
e) Sosialisasi tools Kabupaten/Kota Pangan Aman di Bidang PSAT, PSAH, PSAI dan POSS oleh K/L terkait ke Pemerintah Daerah
f) Monitoring pengambilan akun dan pengisian tools KKPA oleh Pemerintah Daerah
g) Advokasi dan sosialisasi diupayakan secara langsung kepada key person dilaksanakan ke Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Bontang.

**5) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 1.5)**

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputian 1, 2, dan 3.

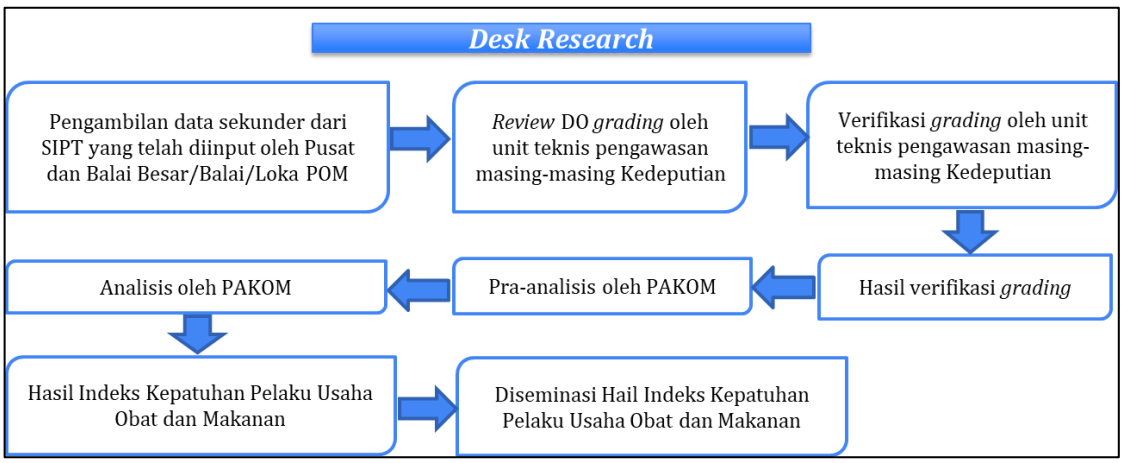
Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5) Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).



Gambar 3.9 Desk/Pendampingan Pelaku Usaha

Metode yang digunakan adalah metode *desk research*, yaitu analisis kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan *Definisi Operational* (DO) oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik *(Top one box/Top two boxes)*, kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional.



**Indeks IKPU Nasional :**

$$Indeks\ IKPU\ Nasional\ = \sum_{k=1}^{5} (Indeks\ per\ Komoditi\ x\ Bobot\ per\ Komoditi)$$

k = Komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks kepatuhan pelaku usaha dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

**6) Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan (IKSS 1.6)**

Penguatan laboratorium pengujian diukur dengan indikator komposit dari pemenuhan terhadap dua standar yang ditetapkan, yaitu :

1) *Grand Design* Laboratorium - *Grand Design (GD)* Penguatan Laboratorium Pengujiansediaan farmasi dan pangan olahan adalah pedoman dalam merencanakan penguatan laboratorium Pengujian Obat dan Makanan dimasa depan secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan (bobot 50%).
   Implementasi Grand Design laboratorium diukur melalui 5 komponen, yaitu:
   a) Persentase pemenuhan laboratorium terkoneksi dalam sesuatu jejaring secara terpadu
   b) Persentase implementasi laboratorium hijau
   c) Persentase implementasi digitalisasi laboratorium
   d) Nilai Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium
   e) Persentase laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai standar.

2) Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM (bobot 50%).
   Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 5, tingkat 4, tingkat 3 tingkat 2 dan tingkat 1.

**Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan dihitung berdasarkan Nilai komposit dari dua sub indikator dengan proporsi sbb :**

**(50% Grand Design Penguatan Laboratorium) + (50% Standar Kemampuan Laboratorium)**

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

| Komponen | Bobot | Realisasi | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|
| *Grand Design* Laboratorium | 50% | 19,10 | 9,55% |
| Standar Kemampuan Laboratorium | 50% | 72,35 | 36,17% |
| **Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan** | | | **45,72%** |

**Tabel 3.5 Capaian Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan**

| Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target 2026 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | B07 | | | B08 | | | B09 | | | Kategori | Capaian Terhadap Target 1 Tahun | |
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | % | Kategori |
| 63,6 | 43,8 | 44,69 | 44,3 | 44,69 | 100,88 | 44,3 | 44,69 | 100,88 | 45,3 | 45,72 | 100,93 | Sangat Baik | 71,89 | Akan Tercapai |

Indikator **Persentase Penguatan Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap Standar yang Ditetapkan** menunjukkan kinerja yang sangat baik pada triwulan III-2026. Dari target sebesar 45,3%, realisasi mencapai 45,72% atau 100,93% dari target, dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menandakan bahwa upaya pemenuhan standar laboratorium, baik dari sisi sarana, prasarana, maupun kompetensi, berjalan sesuai rencana. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sebesar 63,6%, capaian saat ini baru mencapai 71,89% dan masuk kategori “Akan Tercapai”. Diproyeksikan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator akan tercapai 100%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

a) Komitmen Kelembagaan yaitu dukungan pimpinan dan institusi untuk memperkuat jejaring laboratorium, termasuk pengalokasian anggaran dan sumber daya.
b) Standardisasi dan Akreditasi yaitu kapasitas laboratorium anggota jejaring telah memenuhi standar ISO/IEC 17025 serta penggunaan metode uji yang tervalidasi dan tersertifikasi secara nasional/internasional.

c) Teknologi dan Infrastruktur yaitu adanya platform digital yang memungkinkan kegiatan pertemuan jejaring tanpa terbatas jarak dan waktu. Sistem digital juga mendukung pelaporan dan sharing knowledge antar laboratorium dapat berlangsung dengan efektif.
d) SDM laboratorium yang kompeten dan terlibat aktif dalam jejaring laboratorium.
e) Koordinasi dan Kolaborasi yaitu terselenggaranya forum koordinasi dan komunikasi rutin antar laboratorium jejaring (misalnya melalui rapat koordinasi, workshop, dan sistem early warning).
f) Nilai rata-rata SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 melebihi target, hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM. Peningkatan tersebut antara lain karena berbagai upaya dari UPT melakukan rencana tindak lanjut yang telah dibuat.

Beberapa kegiatan telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator ini antara lain:
1) Kegiatan jejaring laboratorium berupa pelatihan/workshop, pertemuan/Forum Group Discussion, dan persiapan uji kolaborasi/profisiensi
2) Pemantauan pemenuhan rencana tindak lanjut dan pengawalan pemenuhan target SKL pada triwulan berikutnya dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL
3) Workshop Peningkatan Kompetensi Verifikator Laboratorium Badan POM
4) Pengembangan metode analisis, pengembangan baku pembanding, pengujian sampel Obat dan Makanan (obat, bahan obat, NAPPZA, obat tradisional, obat kuasi, suplemen Kesehatan, kosmetik, pangan, produk biologi, dan rokok) serta kalibrasi alat laboratorium

Di samping itu beberapa *output* yang paling berkontribusi terhadap pencapaian kinerja diantaranya:
a) Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
b) Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
c) Sarana Pengujian Obat dan Makanan
d) Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan *Grand Design*

## 2. Sasaran Strategis

### Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu

Sasaran strategis ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas sediaan farmasi dan pangan

olahan. Melalui pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BPOM berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator **"Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu"**.

**7) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu (IKSS 2.1)**

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

**Indeks Kesadaran Masyarakat** adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan, Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik (≤ 45,00); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik (≥ 90,01).

**Pengetahuan (*Knowledege*)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga

sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

**Sikap (*Attitude*)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

**Sedangkan Perilaku (*Practices*)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

$$Indeks\ Nasional = \sum_{k=1}^{5} (Indeks\ per\ Komoditi\ \times Bobot\ per\ Komoditi)$$

Ket:
k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)
IK : Indeks per Komoditi
c : Bobot komoditi

Kategori Indeks:

| | |
|---|---|
| >90-100 | Sangat Baik |
| >66,67-90 | Baik |
| >33,33-66,67 | Cukup |
| 0-33,33 | Kurang |

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks kesadaran masyarakat dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

## 3. Sasaran Strategis

### Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan

Sasaran strategis ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri (termasuk UMKM) sediaan farmasi dan pangan olahan agar lebih inovatif dan mandiri. Upaya ini mencakup pendampingan dalam pengembangan produk inovatif, peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk UMKM dalam menerapkan standar

keamanan dan mutu produksi, serta pembinaan yang mendorong pelaku industri untuk secara bertahap menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga konsistensi mutu secara berkelanjutan. Selain itu juga, upaya mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

a. Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar
b. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan
c. Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan

Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

**8) Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar (IKSS 3.1)**

Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah hasil penelitian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawalan terhadap Inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mencakup pengawalan/pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

a. Obat pengembangan baru,
b. Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
c. Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar diukur dari 3 komponen indikator pembentuk yaitu:

1. Persentase pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar (komponen A)
2. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar (komponen B)
3. Persentase fasilitasi pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar (komponen C)

$$\frac{Komponen\ (A + B + C)}{3}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar dilakukan pada triwulan IV tahun 2026. Meskipun demikian dalam rangka mendukung capaian indikator ini telah dilaksakanan beberapa kegiatan terkait pengawalan hilirisasi Obat Pengembangan Baru yang dikawal sesuai standar dan pengembangan inovasi pangan olahan yang terstandar diantaranya:

a) Asistensi regulatori, intensifikasi pembahasan dengan tim ahli dan koordinasi lintas sektor untuk pembangunan eksosistem riset obat pengembangan baru di Indonesia.
b) Pembasan dalam inventarisasi data yang diperlukan serta tinjau lapang terkait dengan inovasi bahan alam yang difasilitasi

**9) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan (IKSS 3.2)**

Ruang lingkup UMKM yang dimaksud adalah:

a) Untuk pangan olahan mencakup usaha mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan usaha kecil yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) Untuk UMKM Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik, mencakup:
    - Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
    - industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah:

a) UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
b) UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
c) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan dihitung dari 2 (dua) komponen yaitu:

a) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan (komponen A)

$$\mathbf{A} = \frac{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ \ yang\ memperoleh\ IP{-}CPPOB}{Jumlah\ UMK\ Pangan\ Olahan\ yang\ \ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Aalam (OBA) dan Kosmetik (komponen B)

$$\mathbf{B} = \frac{jumlah\ UMKM\ OBA\ yang\ memperoleh\ \ CPOTB\ Bertahap + jumlah\ UMKM\ Kos\ yang\ memperoleh\ SPA\ CPKB}{Jumlah\ UMKM\ OBA\ dan\ Kos\ yang\ didampingi\ pada\ tahun\ berjalan} \ x\ 100\%$$

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan:

$$\frac{Komponen\ (A + B)}{2}$$

Hasil pengukuran dua komponen tersebut sebagai berikut:

a) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Pangan Olahan. Dari 418 UMK pangan olahan yang didampingi pada tahun berjalan, sebanyak 311 UMK pangan olahan yang memperoleh IP-CPPOB (74,40%).

b) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Aalam (OBA) dan Kosmetik. Dari 118 UMKM OBA dan Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan, sebanyak 60 UMKM OBA dan Kosmetik memperoleh CPOTB bertahap dan SPA CPKB (50,85%).

**Tabel 3.6 Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan**

| Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target 2026 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | B07 | | | B08 | | | B09 | | | Kategori | Capaian thd Target 1 Tahun | |
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | % | Kategori |
| 77,5 | - | - | 27 | 40,42 | 149,72 | 42 | 50,87 | 121,12 | 54 | 62,62 | 115,96 | Tidak Dapat Disimpulkan | 80,81 | Akan Tercapai |

Indikator **Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan** menunjukkan kinerja yang sangat baik pada triwulan III-2026. Meskipun demikian realisasi ini jauh melebih target sebesar 54% dengan capaian 115,96%, sehingga dikategorikan "Tidak Dapat Disimpulkan". Hal ini disebabkan banyaknya pergeseran target UMK OBA-Kos ke UMK Pangan Olahan sehingga menyebabkan tingginya jumlah UMK pangan olahan yang memperoleh IP-CPPOB (melebihi target). Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sebesar 77,5%, capaian saat ini baru mencapai 80,81% dan masuk kategori "Akan Tercapai". Diproyeksikan pada akhir tahun seluruh komponen pengukuran indikator ini dapat tercapai, sehingga target indikator akan tercapai 100%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1) Pemilihan target UMK didasarkan pada hasil pemeriksaan sarana awal. Dari total target 418 UMK, sebanyak 19 UMK (5%) berada pada kategori A, 43 UMK (10%) pada kategori B, dan 139 UMK (33%) pada kategori C. Kondisi sarana UMK pada kategori tersebut relatif lebih siap memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga mendukung percepatan pencapaian target penerbitan IP CPPOB
2) Sebanyak 37 UMK (6%) telah mengikuti bimbingan teknis pada tahun 2024-2025, sehingga mempercepat perolehan IP CPPOB pada tahun 2026
3) Melakukan monitoring dan evaluasi pendampingan UMK melalui koordinasi intensif dengan UPT, terutama untuk memantau kondisi UMK baru. Monitoring dan evaluasi pendampingan UMK oleh UPT bulan September 2026 menunjukkan capaian indikator sebesar 74,40%, yaitu 311 dari 418 UMK yang didampingi telah memperoleh IP CPPOB.
4) Pembentukan Fasilitator UMKM OBA, SK, Kos
5) Pendampingan UMKM melalui fasilitator dan Program Orang Tua Angkat
6) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi fasilitator dan Program Orang Tua Angkat.

Berikut beberapa kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

**Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko**

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pergeseran target UMK OBAKos ke UMK Pangan di TW III sehingga pelaksanaan tahapan pendampingan | Monitoring dan evaluasi pendampingan UMK melalui koordinasi intensif ke UPT terutama dalam | Monitoring dan evaluasi pendampingan UMK melalui koordinasi intensif ke UPT terutama dalam | TW 4 | Y | S.13 . Meningkatnya peredaran produk pangan olahan dari UMKM yang tidak |

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tidak sesuai dengan KepKa BPOM Nomor 78 tahun 2026 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK PO yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan mundur. | memonitor kondisi UMK baru | memonitor kondisi UMK baru | | | memenuhi standar keamanan dan mutu. |
| 2 | Pelaporan masih dilakukan melalui kanal manual sehingga menyulitkan rekap data, monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. | Pengembangan sistem pelaporan online melalui Istana UMKM yang memungkinkan pencatatan kegiatan pendampingan secara terstruktur, real-time, dan terpusat. Melalui digitalisasi pelaporan, UPT akan lebih mudah mendokumentasikan kegiatan, memetakan capaian penerapan CPPOB oleh UMK, serta menyediakan data yang kredibel untuk perencanaan intervensi pembinaan secara terpadu | Pembahasan dengan pengembang sistem pelaporan online untuk pembahasan progres pengembangan | | | |
| 3 | Perlu adanya pemahaman pengetahuan bagi pelaku UMKM OBA dan | Menyelenggarakan FGD Perubahan Risiko Perizinan Obat | Menyelenggarakan FGD Perubahan Risiko Perizinan Obat | TW 4 | Y | OP-08/45 UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik |

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kosmetik terkait PP 28 tahun 2025 khususnya KBLI 21022 (OBA) dan KBLI 20232 (kosmetik) | Bahan Alam dan Kosmetik | Bahan Alam dan Kosmetik | | | belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar |

**10) Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan (IKSS3.3)**

Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kemampuan pelaku usaha untuk secara mandiri menjamin bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang diproduksi, diedarkan, dan dikonsumsi aman, bermutu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa ketergantungan berlebihan pada intervensi atau pengawasan eksternal dalam hal ini pemerintah. Tingkat kemandirian dinilai dari level maturitas industri dalam memenuhi CPOB, CPOTB, CPKB, CPPOB dan regulasi terkait lainnya.

Indikator ini dihitung dari 3 (tiga) komponen indikator yaitu:

a) Persentase industri farmasi yang meningkat level maturitasnya (komponen A)
*Numerator:* Jumlah industri farmasi yang meningkat level maturitasnya pada tahun berjalan.
*Denominator*: Jumlah seluruh industri farmasi produk jadi yang telah memiliki sertifikat CPOB dan diverifikasi pada tahun berjalan.

Untuk industri farmasi maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri farmasi dalam pemenuhan CPOB dan regulasi terkait khususnya industri farmasi secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB serta aspek kepatuhan terhadap regulasi yang terkait antara lain farmakovigilans, ketentuan registrasi/*Good Submission Practice*, dan lain-lain.

b) Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas (komponen B)
*Numerator:* Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dan jumlah industri kosmetik yang mendapat sertifikat CPKB full aspek
*Denominator*: Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia dan seluruh industri kosmetik yang mengikuti program maturitas

Untuk industri OBA maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri OBA dalam pemenuhan CPOTB dan regulasi terkait khususnya industri OBA secara proaktif secara self improvment dalam pemenuhan CPOTB serta regulasi lainnya.
Untuk industri kosmetik maturitas yang dimaksud adalah kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan regulasi di bidang kosmetik, dalam hal ini kemampuan industri kosmetik dalam menerapkan aspek CPKB secara penuh (ful aspect) serta secara proaktif melakukan perbaikan secara berkelanjutan

c) Persentase sarana produksi pangan olahan yang pro aktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan (komponen C)
*Numerator:* Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang memiliki Level Pemenuhan Regulasi Lanjutan.
*Denominator*: Jumlah sarana produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar.

Maturitas adalah kemampuan unit produksi Pangan Olahan dengan skala usaha besar yang telah beroperasi dalam memproduksi pangan olahan dan dinilai telah mampu meningkatkannya pada level pemenuhan regulasi lanjutan.

Pengukuran Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan menggunakan formula:

$$\frac{Komponen\ (A + B + C)}{3}$$

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

## 4. Sasaran Strategis

### Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sasaran strategis ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi dan menindak tegas pelaku kejahatan di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. Berbagai upaya seperti meningkatkan pengawasan *e-commerce* dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan”.

**11) Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (IKSS 4.1)**

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah ukuran kinerja BPOM dalam menilai seberapa efektif pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dalam satu tahun.

Penegakan hukum yang dimaksud mencakup dua aspek utama, yaitu:

1. Penyidikan (40%)
   Mengukur keberhasilan penyelesaian perkara kejahatan melalui proses hukum (*pro-justitia*), mulai dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyerahan berkas perkara (Tahap I), dinyatakan lengkap oleh Jaksa (P21), hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Semakin tinggi persentase keberhasilan penyidikan, semakin baik kontribusinya terhadap nilai indeks.

2. Deteksi (60%)
   Mengukur efektivitas kegiatan pencegahan dan deteksi dini yang meliputi:
   - **Siber** (patroli siber, profiling, digital forensik),
   - **Cegah Tangkal** (analisis peta rawan dan penggalangan pemangku kepentingan),
   - **Intelijen** (operasi intelijen dan rekomendasi tindak lanjut).

   Nilai deteksi dihitung berdasarkan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Semakin optimal tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, semakin tinggi kontribusinya terhadap indeks.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh nilai untuk masing-masing komponen indikator sebagai berikut:

| Komponen | Bobot | Realisasi | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|
| Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 40% | 63,6 | 25,44 |
| Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal | 60% | 74,77 | 44,86 |
| **Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** | | | **70,30** |

**Tabel 3.8 Capaian Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**

| Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target 2026 | Realisasi TW I | Realisasi TW II | B07 | | | B08 | | | B09 | | | Kategori | Capaian Terhadap Target 1 Tahun | |
| | | | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | % | Kategori |
| 81,66 | 36,78 | 60,10 | 52,8 | 58,76 | 111,29 | 52,8 | 58,72 | 111,21 | 71,44 | 70,30 | 98,40 | Baik | 86,09 | Akan Tercapai |

Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada triwulan III-2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi indeks ini mencapai 70,30 atau 98,40% dari target sebesar 71,44, dengan kategori **"Baik"**. Hal ini dipengaruhi oleh penetapan penyesuaian target *output* berkas perkara dilaksanakan pada bulan Juni sehingga sebagian besar UPT baru efektif melaksanakan kegiatan penyidikan di bulan Agustus. Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I dan II (36,78 dan 60,10), terdapat peningkatan sebesar 33,52 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 sebesar 81,66, capaian indikator baru 86,09% dan berada dalam kategori **"Akan Tercapai"**.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1) Pendampingan secara intensif kepada UPT dalam proses penyidikan dan penyelesaian perkara untuk memperkuat koordinasi, menyelaraskan pelaksanaan penyidikan, dan mempercepat penanganan kasus.
2) Pelaksanaan tahapan penyelesaian perkara secara berkelanjutan, baik terhadap perkara tahun berjalan maupun perkara carry over, sehingga mendukung peningkatan realisasi indikator secara bertahap.
3) Penguatan kapasitas dan keseragaman pelaksanaan fungsi di UPT melalui supervisi, pembinaan, steering, coaching clinic, serta peningkatan kompetensi petugas.
4) Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pertukaran data dan informasi untuk mendukung deteksi serta pengungkapan jaringan kejahatan.
5) Penguatan kemampuan deteksi kejahatan di ruang digital, melalui peningkatan kompetensi investigasi siber, dukungan forensik digital, dan penguatan tata kelola laboratorium forensik digital.
6) Pelaksanaan program pencegahan dan deteksi yang responsif terhadap kerawanan, termasuk aksi nasional, kegiatan cegah tangkal, serta tindak lanjut terhadap isu strategis di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan.

Meskipun target indikator ini tercapai dengan sangat baik, namun masih terdapat kendala terutama dalam penanganan berkas perkara. Berikut matriks kendala dan rekomendasi untuk perbaikan ke depan:

**Tabel 3.9 Matriks Rekomendasi dan Pengelolaan Risiko**

| No | Kendala/ Permasalahan | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)* | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penetapan penyesuaian target output berkas perkara dilaksanakan pada bulan Juni sehingga sebagian besar UPT baru efektif melaksanakan kegiatan penyidikan di bulan Agustus | Percepatan penyelesaian perkara di UPT | Melakukan pendampingan proses penyidikan terhadap UPT agar perkara dapat segera terselesaikan | TW 4 | Y | S.101 Terhambatnya penyelesaian berkas perkara |

## 5. Sasaran Strategis

### Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran ini ditujukan untuk membangun BPOM sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Upaya memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional. Selain itu, sasaran strategis ini juga menekankan peningkatan kualitas layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya serta memperkuat sistem perizinan produk yang diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator “Indeks RB BPOM”.

**12) Indeks RB BPOM (IKSS 5.1)**

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah gambaran tingkat kemajuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berkualitas. Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu **Evaluasi Internal** dan **Evaluasi Eksternal**. Evaluasi Internal dilakukan oleh

evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim refomasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.
Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi **RB *General*** dan dimensi **RB Tematik**. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.

Sesuai dengan definisi operasional dari indikator ini, pengukuran terhadap Indeks RB BPOM dilakukan pada triwulan IV tahun 2026.

## D. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya:

## Tabel 3.10 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi

| No | Indikator | Kendala/Permasalahan Triwulan II | Rekomendasi Triwulan II | Status | Progres TL Rekomendasi | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu | 1. Ada kemungkinan sampling produk TIE non BKO yang sama,potensi tersampling oleh UPT yang lain pada produk yang sama (sebulan sekali) | Perlu adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan | Belum selesai | Monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian serta penandaan telah dilakukan selama TW III namun kegiatan ini terus berlangsung sampai akhir tahun | TW IV 2026 | Y | Meningkatnya temuan produk OBA dan SK yang TMS keamanan termasuk parameter OBA dan SK-BKO berdasarkan pengawasan BPOM |
| | | 2. Pemilihan sampel belum dilakukan secara optimal pada produk TIE, sehingga sampai dengan bulan Februari belum terdapat sampel TIE yang disampling | Monitoring pelaksanaan sampling oleh UPT sesuai dengan renlak dan pedoman sampling | Belum selesai | Monitoring pelaksanaan sampling dan pengujian serta penandaan telah dilakukan selama TW III namun kegiatan ini terus berlangsung sampai akhir tahun | TW IV 2026 | Y | |
| | | 3. Potensi penurunan realisasi capaian IKU disebabkan oleh evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum | 1. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan | Belum selesai | 1. Kegitan monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara berkala kepada UPT | TW IV 2026 | Y | Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya |

| No | Indikator | Kendala/Permasalahan Triwulan II | Rekomendasi Triwulan II | Status | Progres TL Rekomendasi | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkanacuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan | 2. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4 | | 2. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan rencana akan dilaksanakan pada TW 4 pada bulan november | | | dan/atau dilarang. |
| 2 | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 1. Belum optimalnya implementasi UPT dalam risk based sampling pangan olahan. UPT masih memerlukan evaluasi, bimbingan teknis, supervisi untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman sampling pangan dengan konsep baru dan perlunya informasi | 1. Melakukan pendampingan teknis kepada seluruh UPT utamanya dalam hal pengambilan sampel sesuai konsep PS<br>2. Melakukan Refreshment pemahaman dan sharing antar UPT dalam regionnya<br>3. Penerbitan surat monitoring dan | Belum selesai | Kegiatan masih dilaksanakan hinga triwulan IV | TW IV 2026 | Y | S.01 Penerapan risk-based targeted sampling dalam pelaksanaan sampling pangan olahan oleh UPT belum konsisten terhadap pedoman |

| No | Indikator | Kendala/Permasalahan Triwulan II | Rekomendasi Triwulan II | Status | Progres TL Rekomendasi | *Timeline* | Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) | Peristiwa Risiko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | terkait produk yang memiliki histori TMS/ TMK<br>2. Tindak lanjut pendalaman sarana yang ditemukan produk TMS tidak dapat dilakukan secara optimal, saat ini dilakukan melalui penerbitan surat peringatan | evaluasi pelaksanaan sampling dan uji ke UPT secara berkala<br>4. Memberikan akses terkait histori produk/perusahaan secara terbatas untuk UPT<br>5. Tindak Lanjut produk TMS berbasis kajian risiko, paralel dengan desk reviu pengujian oleh P3OMN dan UPT | | | | | |
| 3 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Pemberlakuan undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sehingga diperlukan penyesuaiaan dalam penanganan perkara di bidang farmasi dan pangan olahan | Melakukan sosialisasi implementasi undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP | Selesai<br>(Sudah dilakukan sosialisasi dalam kegiatan pendampingan terhadap UPT) | - | - | T | - |

## E. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-322/AG/AG.4/2026 Perihal Penetapan Revisi Anggaran Tahap IV Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2026 tanggal 18 Juli 2026, dilakukan buka blokir kode A pada Program Dukungan Manajemen dan Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp23.618.966.000, sehingga Pagu Anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp1.949.368.991.000,00. Hingga triwulan III-2026 telah direalisasikan sebesar Rp1.408.828.131.498,00 atau 72,27% dari total anggaran.

Adapun rincian realisasi anggaran BPOM per indikator sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja**

| NO | SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| **SS 1** | Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 358.242.359.500,00 | 231.971.283.816,00 | 64,75 |
| **IKSS 1.1** | Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu | 38.395.549.000,00 | 28.489.612.820,00 | 74,20 |
| **IKSS 1.2** | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 16.466.206.500,00 | 10.693.146.683,00 | 64,94 |
| **IKSS 1.3** | Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 7.187.019.000,00 | 4.685.038.870,00 | 65,19 |
| **IKSS 1.4** | Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 17.137.119.500,00 | 11.921.238.066,00 | 69,56 |
| **IKSS 1.5** | Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 37.347.165.500,00 | 24.450.973.531,00 | 65,47 |
| **IKSS 1.6** | Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan | 241.709.300.000,00 | 151.731.273.845,00 | 62,77 |
| **SS 2** | Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | 37.555.232.000,00 | 31.714.458.238,00 | 84,45 |
| **IKSS 2.1** | Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | 37.555.232.000,00 | 31.714.458.238,00 | 84,45 |
| **SS 3** | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 12.320.048.500,00 | 7.939.646.855,00 | 64,44 |
| **IKSS 3.1** | Persentase Inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 3.015.378.000,00 | 2.030.305.004,00 | 67,33 |
| **IKSS 3.2** | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi | 5.688.120.500,00 | 3.934.491.015,00 | 69,17 |

| NO | SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA | PAGU | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| | Obat Bahan Alam. Kosmetik. dan Pangan Olahan | | | |
| **IKSS 3.3** | Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 3.616.550.000,00 | 1.974.850.837,00 | 54,61 |
| **SS 4** | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 28.203.159.000,00 | 18.206.889.964,00 | 64,56 |
| **IKSS 4.1** | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 28.203.159.000,00 | 18.206.889.964,00 | 64,56 |
| **SS 5** | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | 1.513.048.192.000,00 | 1.118.995.852.625,00 | 73,96 |
| **IKSS 5.1** | Indeks RB BPOM | 1.513.048.192.000,00 | 1.118.995.852.625,00 | 73,96 |
| **Total** | | **1.949.368.991.000,00** | **1.408.828.131.498** | **72,27** |

*Sumber: Aplikasi MyIntress*

Secara umum, penyerapan anggaran berjalan cukup optimal dan proporsional untuk periode triwulan ketiga, di mana sebagian besar sasaran strategis telah mendekati atau melewati angka 65%. Kinerja penyerapan tertinggi dicapai oleh **SS 2** (Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu) dengan tingkat realisasi sebesar **84,45%**, yang menunjukkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan edukasi masyarakat.

Di sisi lain, alokasi anggaran terbesar terkonsentrasi pada **SS 5** (Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima) dengan pagu Rp1,51 triliun dan telah terealisasi sebesar **73,96%**. Meskipun sebagian besar indikator menunjukkan performa yang stabil, **IKSS 3.3** (Tingkat Kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan) mencatat penyerapan terendah, yaitu hanya **54,61%**. Hal ini mengindikasikan perlunya akselerasi program pendampingan industri dan intervensi khusus pada triwulan berikutnya agar target kemandirian pelaku usaha dapat tercapai secara maksimal.

Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dan disiplin anggaran pada triwulan IV tahun 2026, beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain:

a) Pembayaran atas barang/jasa yang telah diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat penerima. Pembayaran tersebut diupayakan secara maksimal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pekerjaan telah selesai dan diterima, terdapat BAST, dan dokumen penagihan lengkap.
b) Percepatan pelaksanaan program utamanya program prioritas Presiden, sehingga target output dapat tercapai sepenuhnya.
c) Melakukan akselerasi penyelesaian kegiatan dan meningkatkan kedisiplinan dalam

pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari PHLN/PDN/SBSN dengan senantiasa mengacu pada jadwal penarikan dana atau Annual Work Plan (AWP) yang telah disepakati.

d) Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui revisi dan realokasi sesuai kebutuhan.
e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan tindak lanjut yang tepat waktu.

## Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran "sama atau lebih tinggi" dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}} \quad \Rightarrow \quad TE = \frac{\text{IE} - \text{SE}}{\text{SE}}$$

Keterangan:
IE : Indeks Efisiensi
TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar
SE : Standar Efisiensi = 1
Apabila IE ≥ SE maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika IE ≤ SE maka dianggap **tidak efisien**.

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

| No | Tingkat Efisiensi | Capaian |
|---|---|---|
| 1 | <0 | Tidak Efisien |
| 2 | 0 – 0,2 | 100% (efisien) |
| 3 | 0,21 – 0,4 | 95% (efisien) |
| 4 | 0,41 – 0,6 | 92% (efisien) |
| 5 | 0,61 – 0,8 | 90% (efisien) |
| 6 | 0,81 – 1,0 | 88% (efisien) |
| 7 | 1,01 – 1,2 | 86% (tidak efisien) |
| 8 | 1,21 – 1,4 | 84% (tidak efisien) |
| 9 | 1,41 – 1,6 | 80% (tidak efisien) |
| 10 | 1,61 – 1,8 | 78% (tidak efisien) |
| 11 | >1,81 | 75% (tidak efisien) |

**Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja**

| NO | SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR | PAGU (RPD s.d September) | REALISASI ANGGARAN | % | CAPAIAN KINERJA (%) | INDEKS EFISIENSI | TINGKAT EFISIENSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IKSS 1.1** | Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu | 26.434.244.776,00 | 28.489.612.820,00 | 107,78 | 99,22 | 0,92 | -0,08 (Tidak Efisien) |
| **IKSS 1.2** | Persentase pangan olahan & PIRT yang aman dan bermutu | 11.336.515.416,00 | 10.693.146.683,00 | 94,32 | 99,42 | 1,05 | 0,05 (100% Efisien) |
| **IKSS 1.6** | Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan | 166.409.986.760,00 | 151.731.273.845,00 | 91,18 | 100,93 | 1,11 | 0,11 (100% Efisien) |
| **IKSS 3.2** | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 3.916.109.381,00 | 3.934.491.015,00 | 100,47 | 115,96 | 1,15 | 0,15 (100% Efisien) |
| **IKSS 4.1** | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 19.417.073.798,00 | 18.206.889.964,00 | 93,77 | 98,03 | 1,05 | 0,05 (100% Efisien) |
| | **Total** | **223.597.820.749,00** | **213.055.414.328,00** | **95,29** | **101,59** | **1,07** | **0,07 (100% Efisien)** |

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan anggaran pada 5 indikator kinerja menunjukkan **kinerja yang efisien secara umum**. Total realisasi anggaran 5 indikator sebesar **Rp213,01 miliar** dari pagu (RPD) **Rp223,59 miliar**, atau sebesar **95,29%**, dengan capaian kinerja sebesar **101,59**. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja secara umum dapat dicapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran, diperoleh **Indeks Efisiensi sebesar 1,07** dan **tingkat efisiensi sebesar 0,07**, sehingga pelaksanaan anggaran dikategorikan **efisien**.

# 4 PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2026 antara lain:

1. Nilai Kinerja Organisasi BPOM Triwulan III Tahun 2026 adalah **101,59** dengan Kategori **"Istimewa"**.
2. Dari 5 (empat) IKSS yang diukur, 1 (satu) IKSS memperoleh capaian Sangat Baik (100% > x ≤ 110%), 3 (tiga) IKSS memperoleh capaian Baik (90% < x ≤ 100%), dan 1 (satu) IKU memperoleh capaian dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (x > 110%).
3. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar **Rp1.408.828.131.498,00** atau 72,27% dari pagu sebesar **Rp1.949.368.991.000,00**.

## B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya antara lain:

1. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pusat dan UPT BPOM dalam Manajemen Sampling Obat untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi pengawasan mutu, sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan.
3. Pengembangan sistem pelaporan online melalui Istana UMKM yang memungkinkan pencatatan kegiatan pendampingan secara terstruktur, real-time, dan terpusat. Melalui digitalisasi pelaporan, UPT akan lebih mudah mendokumentasikan kegiatan, memetakan capaian penerapan CPPOB oleh UMK, serta menyediakan data yang kredibel untuk perencanaan intervensi pembinaan secara terpadu
4. Melakukan pendampingan proses penyidikan terhadap UPT agar perkara dapat segera terselesaikan

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Rencana Kinerja
### Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :
a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

TARUNA IKRAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu | 73,8 |
| | | Persentase pangan olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu | 79 |
| | | Indeks kualitas kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | 90,05 |
| | | Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan | 54,58 |
| | | Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan | 82,75 |
| | | Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 62,1 |
| 2. | Meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu | Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu | 88,6 |
| 3. | Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan | Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | 87,5 |
| | | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan | 71,5 |
| | | Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan | 39,7 |
| 4. | Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan | 75,9 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET |
|---|---|---|---|
| 5. | Terwujudnya birokrasi yang efektif, berintegritas, kolaboratif dan adaptif untuk pelayanan publik yang prima | Indeks RB BPOM | 96,35 |

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



TARUNA IKRAR

# Lampiran 2

## Revisi Perjanjian Kinerja
## Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026

BADAN POM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : TARUNA IKRAR |
| Jabatan | : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI |

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 29 Juli 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

**TARUNA IKRAR**

**Lampiran**

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 01 - Persentase Sediaan farmasi aman dan bermutu | 76.50 |
| | | 02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 87.50 |
| | | 03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 95.48 |
| | | 04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 55.39 |
| | | 05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81.00 |
| | | 06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan | 63.60 |
| 2. | 02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | 01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu | 89.19 |
| 3. | 03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikawal sesuai standar | 88.53 |
| | | 02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | 77.50 |

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET |
|---|---|---|---|
| | | 03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 37.17 |
| 4. | 04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81.66 |
| 5. | 05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | 01 - Indeks RB BPOM | 95.97 |

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 1,949,368,991,000 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

| NO. | PROGRAM | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 1. | WA - Program Dukungan Manajemen | 1,469,554,611,000 |
| 2. | DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan | 479,814,380,000 |

Jakarta, 29 Juli 2026

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

**TARUNA IKRAR**

## Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
## Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026

BADAN POM

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 1. | **01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** | **01.01 - Persentase Sediaan Farmasi Aman dan Bermutu** | | | - | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | 76,50 | **35.411.102.500** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 3165.QDC.002 | Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans | | | | | | | | | | | | | 454.313.000 |
| | | 2 | 3165.QIA.002 | Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 26.201.680.000 |
| | | 3 | 4123.BIA.001 | Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 864.613.000 |
| | | 4 | 4123.QIA.002 | Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan | | | | | | | | | | | | | 1.580.368.000 |
| | | 5 | 4127.PCA.001 | Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | 3.072.434.500 |
| | | 6 | 4119.BIA.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu | | | | | | | | | | | | | 1.076.685.000 |
| | | 7 | 4128.PCA.001 | Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan | | | | | | | | | | | | | 2.161.009.000 |
| | | **01.02 - Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu** | | | - | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | 87,50 | **16.466.206.500** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 8.701.144.500 |
| | | 2 | 4124.QIC.003 | Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya | | | | | | | | | | | | | 1.958.957.000 |
| | | 3 | 4126.PCA.001 | Keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | 1.091.399.000 |
| | | 4 | 4124.BIA.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | 979.226.000 |
| | | 5 | 4124.UBA.001 | Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | | 745.625.000 |
| | | 6 | 4124.QIC.002 | Laporan Surveilan dan Deteksi Dini Insiden Keamanan Pangan MBG | | | | | | | | | | | | | 2.989.855.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | **01.03 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,48 | **7.206.554.000** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4129.AFA.001 | Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun | | | | | | | | | | | | | 2.591.095.000 |
| | | 2 | 4131.AFA.001 | Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun | | | | | | | | | | | | | 942.679.000 |
| | | 3 | 4130.AFA.001 | Standar Pangan Olahan yang Disusun | | | | | | | | | | | | | 2.259.081.000 |
| | | 4 | 4130.PFA.004 | Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun | | | | | | | | | | | | | 150.190.000 |
| | | 5 | 4130.PFA.003 | Regulasi terkait pengaturan label produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun | | | | | | | | | | | | | 183.700.000 |
| | | 6 | 4135.ABG.001 | Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan | | | | | | | | | | | | | 1.079.809.000 |
| | | **01.04 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,39 | **17.137.119.500** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4122.ABG.001 | Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 1.199.508.000 |
| | | 2 | 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 1.458.688.000 |
| | | 3 | 6385.FBA.002 | Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha | | | | | | | | | | | | | 286.544.000 |
| | | 4 | 4132.UBA.001 | Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif | | | | | | | | | | | | | 1.544.843.000 |
| | | 5 | 4132.BDB.003 | UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan | | | | | | | | | | | | | 315.984.000 |
| | | 6 | 4124.UBA.001 | Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | | 745.625.000 |
| | | 7 | 4132.UBA.002 | Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar | | | | | | | | | | | | | 1.087.517.000 |
| | | 8 | 4120.UBA.001 | Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman | | | | | | | | | | | | | 500.028.000 |
| | | 9 | 3165.QIA.001 | Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 8.701.144.500 |
| | | 10 | 3158.AEC.001 | Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan | | | | | | | | | | | | | 757.661.000 |
| | | 11 | 3158.PEC.002 | Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST) | | | | | | | | | | | | | 64.828.000 |
| | | 12 | 3159.FAD.001 | Layanan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | 474.749.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | **01.05 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81,00 | **37.441.887.500** |

| NO | KODE | RO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4125.QIC.001 | Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar | 713.860.000 |
| 2 | 4125.BAH.002 | Keputusan Penilaian Faslitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu | 446.396.500 |
| 3 | 4122.QIC.001 | Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan | 2.397.257.000 |
| 4 | 4119.BIA.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu | 1.076.685.000 |
| 5 | 4121.BIA.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu | 1.715.506.000 |
| 6 | 4128.BIA.001 | Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar | 562.412.000 |
| 7 | 4120.ACD.001 | Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan | 1.194.581.000 |
| 8 | 4120.BIC.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar | 1.573.216.000 |
| 9 | 3165.QIC.001 | Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 1.458.688.000 |
| 10 | 4120.QDI.002 | Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses | 446.879.000 |
| 11 | 3165.QIC.003 | Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT | 333.010.000 |
| 12 | 4124.BIC.002 | Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) | 541.533.000 |
| 13 | 4124.BIA.001 | Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar | 979.226.000 |
| 14 | 3165.QIC.004 | Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT | 21.486.693.000 |
| 15 | 4123.BIA.002 | Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan | 385.207.000 |
| 16 | 4123.QIA.001 | Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan | 493.921.000 |
| 17 | 3165.BIA.001 | Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM | 1.123.380.000 |
| 18 | 4127.BAH.002 | Sarana sentra uji klinik dan bioekivalensi yang memenuhi ketentuan | 326.648.000 |
| 19 | 4133.BIA.005 | Sampel Tembakau dan/atau Elektronik yang diuji memenuhi standar | 186.789.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.06 - Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan** | - | - | 43,30 | 43,30 | 43,30 | 44,30 | 44,30 | 44,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 63,60 | **241.709.300.000** |

| NO | KODE | RO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4133.PDD.001 | Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design | 1.869.173.000 |
| 2 | 4133.BIA.003 | Sampel Kasus/khusus yang ditindaklanjuti tepat waktu | 1.194.230.000 |
| 3 | 4133.AEE.002 | Jejaring Pengujian Khusus Obat dan Makanan | 178.173.000 |
| 4 | 4133.BIA.004 | Sampel Balai Pengujian Produk Biologi yang Diselesaikan sesuai Standar | 1.304.750.000 |
| 5 | 4133.BIA.001 | Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar | 700.205.000 |
| 6 | 3165.RAB.001 | Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 85.939.024.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 7 | 4133.CAB.001 | Sarana Pengujian Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 9.351.642.000 |
| | | 8 | 4133.CAB.002 | Sarana pengujian sampel kasus/khusus/investigasi/rujukan | | | | | | | | | | | | | 6.635.873.000 |
| | | 9 | 4133.AFA.001 | Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan | | | | | | | | | | | | | 2.943.411.000 |
| | | 10 | 4133.AFA.002 | Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan | | | | | | | | | | | | | 2.338.577.000 |
| | | 11 | 4133.PDD.002 | Laboratorium BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | 1.878.030.000 |
| | | 12 | 3165.PDD.001 | Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | | | | | | | | | | | | | 72.833.363.000 |
| | | 13 | 3165.CBV.001 | Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia | | | | | | | | | | | | | 53.312.096.000 |
| | | 14 | 4133.BKB.002 | Laporan Hasil Evaluasi Produk Biologi dalam rangka Lot Release yang Diselesaikan sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | 291.225.000 |
| | | 15 | 4133.CAB.003 | Sarana pengujian sampel Produk Biologi | | | | | | | | | | | | | 939.528.000 |
| 2 | **02 - Meningkatnya kesadaran masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu** | **02.01 - Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu** | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,19 | **37.558.466.000** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4123.BIB.001 | Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan | | | | | | | | | | | | | 322.234.000 |
| | | 2 | 6385.BDC.001 | Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos | | | | | | | | | | | | | 754.817.000 |
| | | 3 | 6385.BDC.002 | Layanan Sosialisasi | | | | | | | | | | | | | 25.000.000 |
| | | 4 | 4132.BDC.001 | Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan | | | | | | | | | | | | | 665.419.000 |
| | | 5 | 3165.BDC.001 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE | | | | | | | | | | | | | 26.708.232.000 |
| | | 6 | 3165.BMB.001 | Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 884.064.000 |
| | | 7 | 3165.BDB.001 | Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan | | | | | | | | | | | | | 2.609.698.000 |
| | | 8 | 3165.BDB.002 | Desa Pangan Aman | | | | | | | | | | | | | 3.518.089.000 |
| | | 9 | 3165.BDB.003 | Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas | | | | | | | | | | | | | 1.949.623.000 |
| | | 10 | 4110.BIC.001 | UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif | | | | | | | | | | | | | 121.290.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 3 | 03 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 03.01 - Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang dikawal sesuai standar | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,53 | 5.966.995.500 |
| | | NO | KODE | RO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4125.BAH.001 | Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO | | | | | | | | | | | | | 121.666.000 |
| | | 2 | 4127.PCA.001 | Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan | | | | | | | | | | | | | 3.072.434.500 |
| | | 3 | 4128.BDB.001 | Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik | | | | | | | | | | | | | 2.317.700.000 |
| | | 4 | 4130.AFA.002 | Standar Produk Inovasi Pangan Olahan | | | | | | | | | | | | | 216.458.000 |
| | | 5 | 4127.PCA.002 | Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar | | | | | | | | | | | | | 238.737.000 |
| | | 03.02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan | | | - | - | - | - | - | - | 27 | 42 | 54 | 57,50 | 69,50 | 77,50 | 5.688.120.500 |
| | | NO | KODE | RO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4119.BAH.001 | Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 884.010.500 |
| | | 2 | 6385.QDC.001 | Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar | | | | | | | | | | | | | 1.165.717.000 |
| | | 3 | 4126.BDG.001 | Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan | | | | | | | | | | | | | 952.254.000 |
| | | 4 | 4132.QDC.001 | Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan | | | | | | | | | | | | | 1.618.698.000 |
| | | 5 | 3165.QDG.001 | UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT | | | | | | | | | | | | | 963.121.000 |
| | | 6 | 4119.BDG.002 | Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 104.320.000 |
| | | 03.03 - Tingkat Kemandirian pelaku usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,17 | 3.626.550.000 |
| | | NO | KODE | RO | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4119.QDI.001 | Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB | | | | | | | | | | | | | 197.100.000 |
| | | 2 | 4120.QDI.001 | Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan | | | | | | | | | | | | | 819.023.000 |
| | | 3 | 4121.QDI.001 | Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh | | | | | | | | | | | | | 948.580.000 |
| | | 4 | 4125.QDI.001 | Jumlah Industri Farmasi yang meningkat level maturitasnya | | | | | | | | | | | | | 187.892.000 |
| | | 5 | 4125.QDI.002 | Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan | | | | | | | | | | | | | 1.473.955.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| 4 | 04 - Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 04.01 - Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | - | - | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 52,80 | 56,82 | 56,82 | 71,44 | 71,44 | 71,44 | 81,66 | **28.210.935.000** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4134.QCD.001 | Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I | | | | | | | | | | | 2.426.057.000 |
| | | 2 | 4134.QKB.001 | Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifiaksi Operasi Penindakan | | | | | | | | | | | 1.155.817.000 |
| | | 3 | 3165.QCD.U74 | Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT | | | | | | | | | | | 13.437.869.000 |
| | | 4 | 6386.QKB.002 | Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi Tindak Lanjut Patroli Siber | | | | | | | | | | | 373.570.000 |
| | | 5 | 6386.QKB.001 | Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | 3.879.415.000 |
| | | 6 | 4117.ABG.002 | Laporan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | 881.726.000 |
| | | 7 | 4117.ABG.001 | Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | 2.117.118.000 |
| | | 8 | 4118.BKB.002 | Dokumen analisis pengembangan operasi intelijen Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | 1.373.058.000 |
| | | 9 | 4118.BKB.U01 | Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas | | | | | | | | | | | 1.348.283.000 |
| | | 10 | 3165.AEA.001 | Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT | | | | | | | | | | | 1.218.022.000 |
| 5 | 05 - Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima | 05.01 - Indeks RB BPOM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,97 | **1.512.945.754.000** |
| | | **NO** | **KODE** | **RO** | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 4122.BAH.001 | Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar | | | | | | | | | | | 732.479.000 |
| | | 2 | 4125.BAH.002 | Keputusan Penilaian Faslitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu | | | | | | | | | | | 446.396.500 |
| | | 3 | 4127.BAH.001 | Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima | | | | | | | | | | | 100.950.000 |
| | | 4 | 4131.ABG.001 | Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan | | | | | | | | | | | 720.317.000 |
| | | 5 | 4123.BAH.001 | Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Bahan Obat ; Analisis Hasil Pengawasan Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dan Certificate | | | | | | | | | | | 537.737.000 |
| | | 6 | 4119.BAH.001 | Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan | | | | | | | | | | | 884.010.500 |
| | | 7 | 4121.BAH.001 | Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu | | | | | | | | | | | 1.345.632.000 |
| | | 8 | 6385.BAH.001 | Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima | | | | | | | | | | | 95.852.000 |
| | | 9 | 4128.BAH.001 | Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima | | | | | | | | | | | 1.092.549.000 |
| | | 10 | 4129.ABG.001 | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan | | | | | | | | | | | 489.345.000 |
| | | 11 | 4126.BAH.001 | Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima | | | | | | | | | | | 1.835.569.000 |
| | | 12 | 4132.BAH.001 | Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan | | | | | | | | | | | 99.141.000 |
| | | 13 | 4120.BAH.001 | Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan | | | | | | | | | | | 413.015.000 |
| | | 14 | 4124.BAH.001 | Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu | | | | | | | | | | | 5.931.727.000 |
| | | 15 | 4130.ABG.001 | Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan | | | | | | | | | | | 342.694.000 |
| | | 16 | 3165.BAH.001 | Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT | | | | | | | | | | | 1.796.009.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 17 | 4133.BAH.001 | Layanan Publik PPPOMN | | | | | | | | | | | | | 233.284.000 |
| | | 18 | 4133.BAH.002 | Layanan Publik Pengujian Khusus Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 88.856.000 |
| | | 19 | 4133.BAH.003 | Layanan Publik Pengujian Produk Biologi | | | | | | | | | | | | | 42.731.000 |
| | | 20 | 4133.BAH.004 | Layanan Publik Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 73.111.000 |
| | | 21 | 4110.BMB.001 | Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan | | | | | | | | | | | | | 445.413.000 |
| | | 22 | 4113.BAH.001 | Layanan Perpustakaan yang diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 86.085.000 |
| | | 23 | 4110.AAH.001 | Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | | | | | | | | | | | | | 259.733.000 |
| | | 24 | 4110.EBA.969 | Layanan Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | 408.138.000 |
| | | 25 | 4110.ABM.001 | Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik | | | | | | | | | | | | | 156.963.000 |
| | | 26 | 4112.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 721.096.000 |
| | | 27 | 4110.ABL.001 | Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | 181.577.000 |
| | | 28 | 3159.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | | | | | | | | | | | | | 2.081.199.000 |
| | | 29 | 3159.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | | | | | | | 869.296.000 |
| | | 30 | 3159.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | | | | | | | | | | | | | 1.206.896.000 |
| | | 31 | 4110.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 564.329.000 |
| | | 32 | 4112.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | | | | | | | | | | | | | 1.427.221.000 |
| | | 33 | 4112.ABQ.001 | Kebijakan Transformasi Manajemen ASN | | | | | | | | | | | | | 333.029.000 |
| | | 34 | 6384.EBA.962 | Layanan Umum | | | | | | | | | | | | | 2.941.872.000 |
| | | 35 | 4113.EBA.956 | Layanan BMN (PPSDM) | | | | | | | | | | | | | 7.580.000 |
| | | 36 | 4114.EBA.956 | Layanan BMN | | | | | | | | | | | | | 7.160.000 |
| | | 37 | 4115.EBA.956 | Layanan BMN | | | | | | | | | | | | | 8.885.000 |
| | | 38 | 6384.EBA.956 | Layanan BMN | | | | | | | | | | | | | 646.389.000 |
| | | 39 | 4113.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | 7.777.374.000 |
| | | 40 | 4114.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | 29.175.171.000 |
| | | 41 | 4115.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | 10.759.373.000 |
| | | 42 | 6384.EBA.994 | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | | | 1.389.199.514.000 |
| | | 43 | 6384.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | | | | | | | | | | | | | 1.292.716.000 |
| | | 44 | 6384.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | | 438.409.000 |
| | | 45 | 3165.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 5.609.408.000 |
| | | 46 | 4131.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 1.367.293.000 |
| | | 47 | 4114.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 1.600.000 |
| | | 48 | 6384.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 927.770.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 49 | 4129.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 1.542.164.000 |
| | | 50 | 6384.EBA.959 | Layanan Protokoler | | | | | | | | | | | | | 273.275.000 |
| | | 51 | 4114.UAB.001 | Pemenuhan Implementasi SPBE BPOM | | | | | | | | | | | | | 798.825.000 |
| | | 52 | 4114.EBA.963 | Layanan Data dan Informasi | | | | | | | | | | | | | 1.310.000.000 |
| | | 53 | 4113.TBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | 4.773.563.000 |
| | | 54 | 4113.TBC.001 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pratama | | | | | | | | | | | | | 7.200.000 |
| | | 55 | 4113.TBC.002 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Administrator | | | | | | | | | | | | | 85.000.000 |
| | | 56 | 4113.TBC.003 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan - Struktural Kepemimpinan Pengawas | | | | | | | | | | | | | 131.787.000 |
| | | 57 | 3158.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | | | | | | | | | | | | | 582.139.000 |
| | | 58 | 3158.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 103.402.000 |
| | | 59 | 3159.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 713.066.000 |
| | | 60 | 4113.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 56.340.000 |
| | | 61 | 4114.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 2.477.093.000 |
| | | 62 | 4115.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 391.628.000 |
| | | 63 | 4116.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 401.523.000 |
| | | 64 | 6384.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | | | | | | | | | | | | | 113.870.000 |
| | | 65 | 4115.EBD.965 | Layanan Audit Internal | | | | | | | | | | | | | 524.531.000 |
| | | 66 | 4116.EBD.965 | Layanan Audit Internal | | | | | | | | | | | | | 352.045.000 |
| | | 67 | 4115.EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | 347.079.000 |
| | | 68 | 4116.EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | | | | | | | | | | | | | 433.272.000 |
| | | 69 | 4131.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif | | | | | | | | | | | | | 171.904.000 |
| | | 70 | 3165.BKB.001 | Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 4.268.607.000 |
| | | 71 | 3165.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia | | | | | | | | | | | | | 5.965.584.000 |
| | | 72 | 4129.CAB.001 | Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | | | | | | | | | | | | | 443.210.000 |
| | | 73 | 4130.BKB.001 | Laporan Koordinasi Pengawasan Pangan Olahan | | | | | | | | | | | | | 904.296.000 |
| | | 74 | 4117.BKB.001 | Laporan koordinasi penindakan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 310.464.000 |
| | | 75 | 4135.BKB.001 | Laporan Koordinasi Analisis Kebijakan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 224.486.000 |
| | | 76 | 4113.PDI.001 | Penilaian dan Sertifikasi SDM Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 1.170.057.000 |
| | | 77 | 4114.BMA.001 | Sistem Informasi Layanan Publik BPOM yang Adaptif dan Terintegrasi | | | | | | | | | | | | | 982.800.000 |
| | | 78 | 4114.EBD.001 | Layanan TIK yang Tersertifikasi sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | 182.800.000 |
| | | 79 | 4133.BKB.001 | Laporan Koordinasi Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kalibrasi Instrumen | | | | | | | | | | | | | 664.318.000 |
| | | 80 | 4129.BKB.001 | Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | | | | | | | | | | | | | 2.815.476.000 |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | | | TARGET | | | | | | | | | | | | ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | |
| | | 81 | 4131.BKB.001 | Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan | | | | | | | | | | | | | 2.512.726.000 |
| | | 82 | 4130.CAN.001 | Perangkat pengolah data dan komunikasi | | | | | | | | | | | | | 708.330.000 |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | **1.949.368.991.000** |

Jakarta, 29 Juli 2026

**Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI**

**TARUNA IKRAR**

## Lampiran 3

# REALISASI KINERJA BPOM TRIWULAN III TAHUN 2026

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | | Target Tahunan | Capaian Kinerja Triwulan III | | | | | | | | | % thd Target Tahunan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | B07 | | | B08 | | | B09 | | | |
| | | | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | |
| SS1 | Meningkatnya Efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | IKSS1.1 | Persentase Sediaan Farmasi yang Aman dan Bermutu | 76,5 | 76,5 | 76,18 | 99,58 | 76,5 | 76,49 | 99,99 | 76,5 | 75,90 | 99,22 | 99,22 |
| | | IKSS1.2 | Persentase pangan olahan dan PIRT yang aman dan bermutu | 87,5 | 87,5 | 87,15 | 99,64 | 87,5 | 87,19 | 99,65 | 87,5 | 86,99 | 99,42 | 99,42 |
| | | IKSS1.6 | Persentase penguatan laboratorium pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terhadap standar yang ditetapkan | 63,6 | 44,3 | 44,69 | 100,88 | 44,3 | 44,69 | 100,88 | 45,3 | 45,72 | 100,93 | 71,89 |
| SS3 | Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan | IKSS3.2 | Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA, Kos, dan Pangan Olahan | 77,50 | 24 | 40,42 | 149,72 | 42 | 50,87 | 121,12 | 54 | 62,62 | 115,96 | 80,81 |
| SS4 | Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | IKSS1.4 | Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan | 81,66 | 52,8 | 58,76 | 111,29 | 52,8 | 58,72 | 111,21 | 71,44 | 70,30 | 98,40 | 86,09 |
| **NKO** | | | | | | | | | | | | | **101,59 (Istimewa)** | |

BADAN POM 2026